

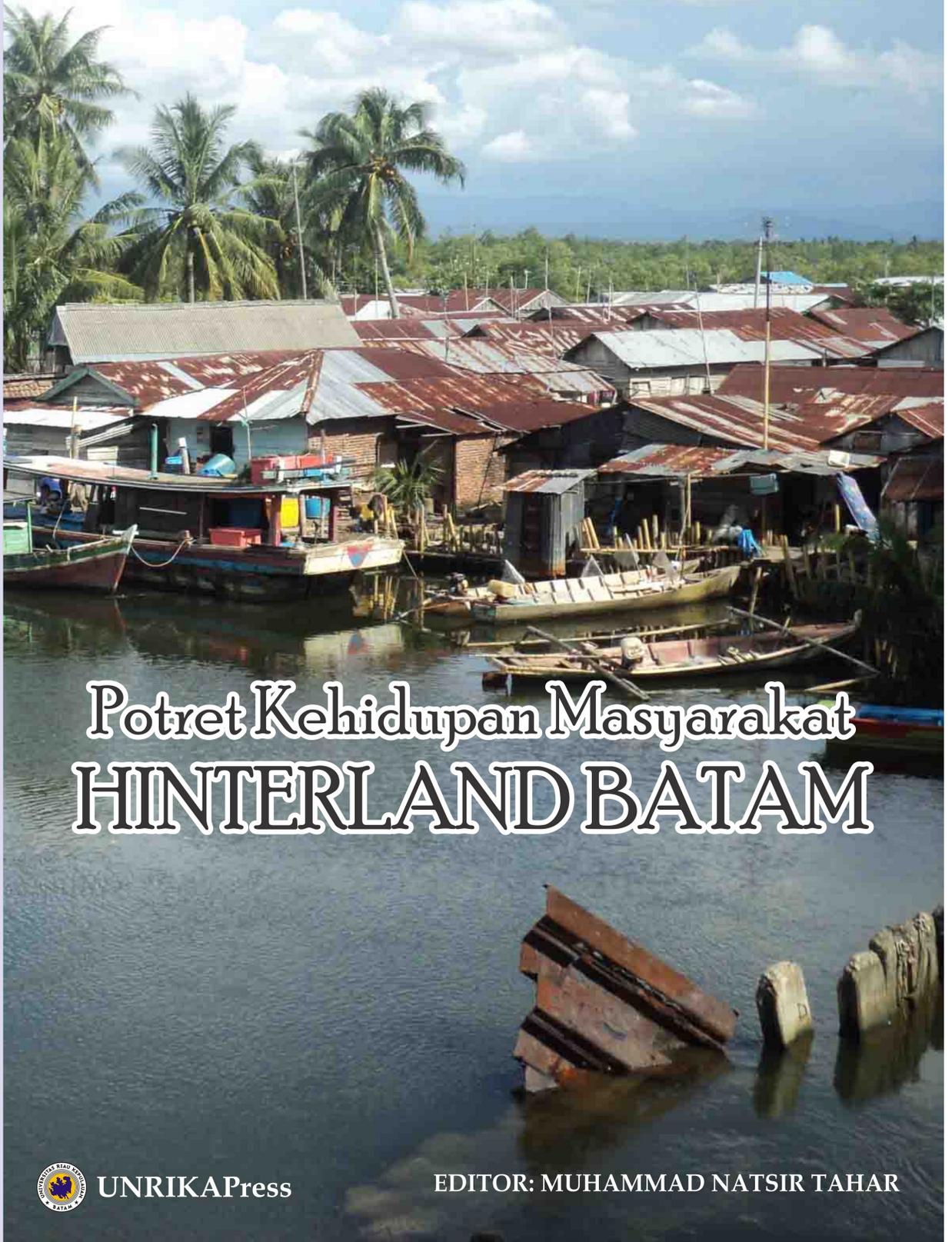
ADE P NASUTION



UNRIKAPress

POTRET KEHIDUPAN MASYARAKAT N HINTERLAND BATAM

ADE P NASUTION



Potret Kehidupan Masyarakat
HINTERLAND BATAM



UNRIKAPress

EDITOR: MUHAMMAD NATSIR TAHAR

POTRET KEHIDUPAN MASYARAKAT HINTERLAND KOTA BATAM

Penulis : Ade Parlaungan Nasution
ISBN : 978-602-74687-8-8
Editor : Muhammad Natsir Tahar
Layout : Aura Diah Meitasari
Desain Sampul : Riki Fazrin

Penerbit : **UNRIKAPress**
Gedung F, Kampus Universitas Riau Kepulauan
Jln. Batuaji Baru No.99 Batuaji, Kota Batam 29424
Telp.(0778) 392752 e-mail : unrikapress@unrika.ac.id
Website : www.unrikapress.unrika.ac.id

Cetakan Pertama , Agustus 2017
17x24 cm, xxi, 162 Halaman
1.Ekonomi 2. Sosial Budaya 3. Pasar Bebas 4. Kebijakan Pemerintah 5. Globalisasi

Dicetak oleh : **PT. Tambun Djaya Printama**
Griya Permai Blok AA No. 2 Sei Binti. Sagulung Kota Batam
Telp. (0778) 392373 e-mail : tambundjayaprintama@gmail.com

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit.

DAFTAR ISI

CATATAN EDITOR

PENGANTAR PENULIS

DAFTAR ISI

PENDAHULUAN ___1

GAMBARAN UMUM WILAYAH HINTERLAND BATAM ___17

SELAYANG PANDANG BELAKANG PADANG ___19

YANG DITINGGALKAN DAN TERTINGGAL ___28

BELAKANG PADANG DALAM KONFIGURASI ANGKA ___34

POTENSI KECAMATAN BELAKANG PADANG ___49

KECAMATAN BULANG : POTRET LAMA YANG MENJADI BARU ___53

KECAMATAN BULANG DALAM ANGKA ___62

KAWASAN HINTERLAND DALAM PERSPEKTIF KUALITATIF ___68

MASYARAKAT HINTERLAND DAN KEDIGDAYAAN PASAR ___71

TEKANAN STRUKTUR EKONOMI INDUSTRIAL ___82

KEBIJAKAN POLITIK : SEBUAH KEALFAAN ___90

BUDAYA BOROS DAN FATALISTIK MASYARAKAT ___99

MEMBACA HASIL SURVEI ___101

MASYARAKAT DAN LINGKUNGAN ALAM ___113

MASYARAKAT DAN HIRUK PIKUK INDUSTRIALISASI ___117

APA KATA MASYARAKAT ? ___132

HARAPAN MASYARAKAT TERHADAP PEMERINTAH ___145

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN ___156

PENDAHULUAN

Sejak dicanangkan Dekade Pembangunan Pertama oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1970 an, terjadi perubahan konstelasi ekonomi politik internasional.

Di satu sisi negara-negara maju di Amerika dan Eropa secara intensif mensosialisasikan arti penting dan strategisnya modernisasi dan industrialisasi di negaranegara sedang berkembang atau *Least Developed Countries* (LDC), dan di lain pihak negara-negara sedang berkembang tidak mempunyai perangkat untuk melakukan modernisasi dan industrialisasi.

Namun demikian sejak dicanangkan dekade pembangunan tersebut, hampir di sebagian besar negara sedang berkembang tak terkecuali Indonesia, juga segera melakukan transformasi ke arah industrialisasi dan modernisasi.

Dokumen- dokumen politik yang tercantum dalam Garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang disusun sejak tahun 1973 terlihat jelas komitmen dan tekad bangsa Indonesia untuk melakukan modernisasi dan

industrialisasi. Transformasi masyarakat dari yang bercorak agraris ke masyarakat industrial modern menetapkan sektor industri sebagai tulang punggung pengembangan perekonomian nasional.

Sejak pemerintah Indonesia melakukan adopsi modernisasi dengan strategi industrialisasi sebagai acuannya dalam pengembangan perekonomian nasional, maka proses industrialisasi dan modernisasi menjadi tak terelakkan.

Pelan tetapi pasti dalam proses industrialisasi dan modernisasi tersebut sumbangan sektor industri memberikan porsi semakin besar dalam pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB) dan penyerapan tenaga kerja.

Secara makro sektor industri juga menjadi lokomotif pertumbuhan perekonomian nasional dan menjadi *leading sector* dalam perkembangan perekonomian nasional secara agregat. Di lain pihak kita juga menyaksikan sebagian masyarakat berkembang menjadi masyarakat modern dengan segala karakteristik yang melekat.

Pendeknya proses industrialisasi, menurut Gie (1985) telah mengubah Indonesia dari perekonomian yang

bercorak dan berbasis pada sektor agraris (tradisional) menjadi perekonomian yang berlandaskan industri dan jasa (modern).

Transformasi dari perekonomian pertanian ke arah perekonomian industrial dan jasa telah memberikan nilai tambah yang cukup besar dan secara ekonomik memberikan implikasi bagi kehidupan masyarakat seperti meningkatnya pendapatan per kapita, penyerapan tenaga kerja, peningkatan devisa dan sebagainya.

Sementara pada arus masyarakat secara sosio kultural juga terjadi transformasi nilai - nilai baru yang modern menggantikan nilai-nilai lama yang dianggap sebagai tradisional.

Temuan empirik dari perspektif ekonomi tentang industrialisasi yang telah memberikan banyak keuntungan ekonomi baik pada skala makro maupun mikro memang tak dapat dipungkiri.

Namun seiring dengan proses industrialisasi dan modernisasi yang selanjutnya dilakukan secara massif, berbagai keuntungan ekonomik yang diperoleh sejak tahun 1985-an mulai banyak digugat oleh para ahli.

Penelitian dilandasi oleh paradoks empiris maupun teoritis mengenai modernisasi dan industrialisasi. Realitas empiris yang berkembang di Batam antara kawasan *hinterland* dan *mainland (bonded)* merupakan fenomena sosiologis, ekonomis, budaya maupun politis yang mencerminkan paradoks teoritis tentang modernisasi dan industrialisasi.

Di satu sisi perspektif yang memandang modernisasi dan industrialisasi sebagai “berkah” yang kemudian dikategorikan dalam pendekatan “*the industrialization and modernization camp*”. Di sisi lain memahami industrialisasi dan modernisasi sebagai “masalah” yang lebih dikenal sebagai “*the impacts externalities camp*”.

Pada aras empirik dapat disaksikan bahwa fenomena yang terjadi di Batam antara kawasan *bonded* dan *hinterland* mencerminkan proses industrialisasi dan modernisasi tidak berjalan secara linier.

Di sebagian besar masyarakat bahkan kurang menikmati hasil percepatan modernisasi dan industrialisasi; sekalipun harus pula diakui bahwa sebagian masyarakat sangat diuntungkan dan mampu

memanfaatkan peluang yang terbuka dari proses industrialisasi dan modernisasi.

Pendekatan teoritik maupun hasil penelitian empirik seringkali banyak menyajikan konfigurasi kesimpulan bahwa ketertinggalan atau keterbelakangan masyarakat dalam mengikuti derap arus modernisasi dan industrialisasi bersumber pada dua hal penting. Faktor obyektif-struktural mencakup struktur ekonomi, politik, budaya dan sistem nilai yang melingkupi kehidupan masyarakat dalam keseharian.

Sebaliknya, berbagai temuan empiris yang mengacu pada pendekatan subyektif psiko-kultural menyajikan kesimpulan bahwa ketertinggalan dan keterbelakangan sebagian masyarakat dalam merespon modernisasi industrialisasi lebih berkaitan dengan faktor psikologis individu dan faktor-faktor subyektif lain seperti kurangnya pendidikan, sikap tradisional yang fatalistik dan ketiadaan motivasi atau kebutuhan berprestasi (*N-Ach*) sebagaimana dikemukakan oleh ahli psikologi David McClelland dan Artkinson (1980).

Buku ini akan menelaah faktor-faktor apa saja yang menyebabkan masyarakat Batam di kawasan *hinterland*

relatif tertinggal atau terbelakang dengan segala atributnya apabila dibandingkan dengan masyarakat Batam yang berada di kawasan *mainland* ?

Kemudian yang perlu dilakukan adalah menjawab pertanyaan mengapa kesenjangan antara masyarakat Batam di kawasan *hinterland* dan kawasan *mainland* itu dapat terjadi? Lalu bagaimanakah suatu model alternatif pemberdayaan masyarakat Batam di kawasan *hinterland* harus dirumuskan untuk memberikan penguatan untuk mengeliminasi ketertinggalannya dan untuk mengeliminasi kendala - kendala yang selama ini menyebabkan masyarakat tidak mampu mengakses sumber-sumber modernisasi?

Buku ini mengetengahkan faktor - faktor yang menyebabkan ketertinggalan dan keterbelakangan masyarakat Batam di kawasan *hinterland* serta latar belakang munculnya *gap* atau kesenjangan antara keduanya. Bahasan akan dilanjutkan dengan rencana model atau desain penguatan dan pemberdayaan masyarakat di kawasan *hinterland* Batam.

Terkait buku ini, Penulis melakukan penelitian dengan memfokuskan kepada masalah dampak

industrialisasi dan kesenjangan antara masyarakat Batam yang berada di kawasan *hinterland* dan kawasan *bonded* sehingga muncul konfigurasi karakteristik masyarakat yang terbelah: di satu sisi masyarakat Batam di kawasan *hinterland* menampakkan ketertinggalan atau keterbelakangan dengan segala atribut yang menyertainya dan di lain pihak berkembang masyarakat Batam di kawasan *mainland* yang maju, menguasai sumber-sumber ekonomi dan mempunyai sikap progresif.

Adanya kesenjangan kehidupan masyarakat yang demikian pada akhirnya akan dapat mendorong timbulnya *destabilizing forces* yang pada akhirnya dapat berkembang menjadi kendala serius atau *constrain* bagi pengembangan modernisasi dan industrialisasi yang berkelanjutan di Batam pada masa mendatang.

Kesenjangan antara kawasan *hinterland* dan *mainland* di Batam akan menjadi *destabilizing forces* khususnya pada masyarakat yang tinggal di kawasan *hinterland* sehingga mereka mengalami dislokasi sosial yang dapat menjadi pendorong munculnya “masyarakat pemberang” karena mereka menganggap bahwa proses modernisasi dan industrialisasi di Batam dirasakan tidak

adil yang membuat mereka menjadi golongan yang tertinggal dan kehilangan banyak kesempatan untuk berkembang.

Ketertinggalan dan keterbelakangan yang seringkali ditandai dengan kemiskinan, kebodohan dan ketidakberdayaan merupakan suatu fenomena multifaset, fenomena multidimensional.

Max-Neef, dalam *Human Scale Development* (1990) menyebutnya sebagai fenomena tidak terpenuhinya kebutuhan dasar dan esensial (*fundamental human needs*) orang sebagai manusia. Di dalam pengertian *less developed proper*, ketertinggalan atau keterbelakangan memang pertama-tama menampakkan fenomena luar yang ditandai dengan kemiskinan.

Dengan demikian hidup dalam kesenjangan dan keterbelakangan bukan hanya hidup di dalam kekurangan materiil, kekurangan pangan dan pendapatan yang rendah (aspek ekonomi), akan tetapi juga di dalam aras kultural yang seringkali nampak sebagai “budaya malas”, kerentanan terhadap berbagai situasi darurat, ketidakberdayaan menghadapi kekuasaan (aspek politik)

dan di atas semuanya, di dalam ketidakberdayaan menentukan jalan hidupnya sendiri (Sackery, 1973).

Semuanya itu jalin menjalin saling mengukuhkan satu sama lain menciptakan siklus labirin yang tak berujung pangkal dan bagi kebanyakan mereka yang mengalaminya seringkali tidak dapat dilepaskan tanpa bantuan orang lain.

Dengan begitu ketertinggalan atau keterbelakangan sebenarnya juga berarti suatu kompleksitas yang luhur dan saling mengukuhkan dari banyak dimensi lain yang menyangkut aspek psikologi, kultural, ekonomi, politik dan sosial.

Tidak pelak lagi jikalau jalan keluar dari situasi ketertinggalan seringkali merupakan jalan berkelok yang harus melintasi onak dan duri, lubang dan jebakan, dan tidak jarang berakhir di jalan buntu.

Apalagi ketertinggalan dan keterbelakangan pada umumnya mempunyai akarnya di dalam sumber-sumber yang sangat kompleks: di dalam kualitas mereka yang mengalaminya - kualitas "*human capital*" yang rendah - di dalam kultur masyarakat yang fatalistik yang mereka sosialisasikan sejak masa kanak-kanak, dan di dalam struktur hubungan-hubungan sosial yang diskriminatif (di

dalam kesenjangan dan ketidakadilan struktur sosial yang mengendalikan hubungan-hubungan sosial mereka dengan warga masyarakat yang lain secara sosio-kultural).

Tidak mengherankan jikalau banyak program pemerintah tentang penguatan dan pemberdayaan masyarakat sebagai upaya untuk mengejar ketertinggalan dan keterbelakangan sekaligus mempersempit kesenjangan yang ada seringkali menemukan kegagalan terutama ketika program yang dimaksud dilakukan melalui suatu pendekatan monistis (tunggal) yang memusatkan perhatiannya pada dimensi yang sempit dari fenomena ketertinggalan - keterbelakangan.

Oleh karena itu sejak awal pemikiran konseptual yang berkembang dalam buku ini tidak menggunakan perspektif monisme teoritik yang mengandaikan bahwa model pemberdayaan atau penguatan masyarakat untuk mengejar ketertinggalan atau keterbelakangannya dapat diselenggarakan berdasarkan aplikasi suatu pendekatan teoritis tunggal tertentu.

Pada saat yang sama penelitian yang dilakukan Penulis terkait hal ini juga tidak akan menggunakan aplikasi tunggal pendekatan ekonomi yang mengandaikan

peguatan dan pemberdayaan masyarakat tertinggal di kawasan *hinterland* Batam dapat dilakukan hanya melalui introduksi struktur - struktur organisasi ekonomi baru seperti jaringan pemasaran dan sebagainya.

Sebaliknya penelitian tersebut dirancang untuk menggunakan suatu integrasi sinergis atau sintesis berbagai kerangka pendekatan teoritis yang melihat upaya penguatan atau pemberdayaan masyarakat tertinggal di kawasan *hinterland* Batam hanya dapat dilakukan dengan lebih berhasil melalui sinergi dari berbagai pendekatan: teknomologis, ekonomis dan sosiokultural.

Di atas kerangka pemikiran konseptual yang demikian, penelitian ini dilakukan di bawah bimbingan tiga buah hipotesis berikut:

Pertama, bahwa secara umum kesenjangan antara masyarakat di kawasan *hinterland* yang tertinggal dan terbelakang dengan masyarakat Batam di kawasan *mainland* yang maju dan modern bersumber dari perbedaan karakteristik masyarakat dalam konteks historis-sosiologis dan perbedaan penguasaan akses sumber - sumber ekonomis.

Kedua, bahwa secara umum keberhasilan suatu model penguatan dan pemberdayaan masyarakat yang tertinggal di kawasan *hinterland* Batam untuk mempersempit kesenjangan dengan masyarakat Batam di kawasan *mainland* menuntut integrasi sinergis introduksi tiga hal sekaligus : (1) aplikasi teknologis baru tepat guna yang cocok dengan kebutuhan masyarakat kawasan *hinterland*; (2) pengembangan struktur -struktur ekonomi; dan (3) pengembangan wadah “dinamika kelompok” (*group dynamic*) dan “dinamika masyarakat” (*community dynamic*) yang dibangun dan dilestarikan di atas bekerjanya keseluruhan “*way of life*” yang hidup di kalangan masyarakat tertinggal - terbelakang di kawasan *hinterland* Batam.

Ketiga, bahwa di dalam penerapannya di lapangan suatu model penguatan atau pemberdayaan masyarakat di kawasan *hinterland* Batam untuk mengejar ketertinggalannya dengan masyarakat di kawasan *mainland* Batam menuntut kesesuaian atau kesebangunan dengan karakter masyarakat Batam di kawasan *hinterland* sebagai lokus atau tempat di mana model itu akan diaplikasikan.

Desain dan Metodologi Penelitian

Riset ini didesain dan dilakukan dengan menggunakan *triangulasi* metodologi penelitian di dalam tradisi ilmu-ilmu sosial: metode penelitian dokumentasi (*documentary research*), metode penelitian survei (*survey research*) dan metode penelitian kancah (*fields research*).

Pendekatan yang pertama akan membimbing penelitian ini pada pengumpulan dan analisis data sekunder berupa dokumen - dokumen hasil penelitian dan “*file*” administrasi berbagai lembaga melalui pemakaian “*narrative content analysis*”.

Yang kedua akan memandu penelitian ini pada pengumpulan data primer yang akan dikumpulkan melalui angket dan wawancara mendalam (*indepth interview*) dan menganalisisnya melalui penggunaan metode analisis kuantitatif dari tradisi keilmuan “*positivistis-naturalis*”.

Dari jumlah penduduk dan rumah tangga tersebut kemudian diambil sampel sebanyak 100 orang untuk masing-masing Kecamatan yang kemudian didistribusikan ke dalam 8 kelurahan.

Sedangkan penggunaan metode penelitian yang ketiga akan dilakukan untuk mengumpulkan data kualitatif berupa kata, tulisan, perilaku dan kejadian - kejadian melalui pemakaian metode observasi dan menganalisisnya melalui metode “*intepretative understanding*” dari tradisi keilmuan “*historis-kulturalis*”.

Penggunaan metode ketiga ini dipergunakan terutama untuk mengungkapkan wawasan dan perspektif para tokoh kunci di masyarakat kawasan *hinterland* dan tokoh-tokoh masyarakat di Batam lainnya.

Wawancara secara mendalam dengan tokoh masyarakat di Kecamatan Belakang Padang dan Bulang dua kecamatan yang tercatat sebagai wilayah *hinterland* mencakup orang-orang yang berada di organisasi pemerintahan maupun non pemerintah termasuk Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

Ada sekitar 48 tokoh masyarakat yang diwawancarai secara mendalam yang terdiri dari Camat, tokoh Nahdatul Ulama (NU), tokoh Muhammadiyah, tokoh partai politik (parpol) yang mempunyai representasi di DPRD Batam, tokoh nelayan, LKMD, PPMS, LSM, pengusaha dan organisasi pemuda.

Hasil penelitian yang kemudian dipaparkan dalam buku ini mencakup sejumlah hal seperti latar belakang penelitian dengan melihat fakta empiris yang berkembang di kawasan *hinterland* Batam.

Buku ini juga menjelaskan dan mendiskripsikan wilayah penelitian yang terdiri dari dua kecamatan yang termasuk kawasan *hinterland* Batam, yakni Kecamatan Belakang Padang dan Kecamatan Bulang. Di dalamnya juga termaktub gambaran wilayah penelitian yang diteruskan analisis data kualitatif.

Data yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara mendalam dengan berbagai elit masyarakat untuk mengetahui bagaimana perspektif elit masyarakat mengenai fenomena keterbelakangan yang ada di kawasan *hinterland* Batam digambarkan dengan detil dan dilengkapi dengan tabulasi data.

Selanjutnya juga terdapat gambaran mengenai hasil survei, yakni menguraikan hasil perspektif masyarakat awam atau masyarakat di tingkat *grass root* mengenai keterbelakangan dan ketertinggalan yang berkembang di kawasan *hinterland*.

Pada bagian akhir diuraikan mengenai kesimpulan dan implikasi kebijakan yang harus diambil bagi semua unsur terkait yang *concern* terhadap pengembangan wilayah *hinterland* Batam.

GAMBARAN UMUM WILAYAH HINTERLAND BATAM

Batam adalah nama wilayah yang sangat terkenal, tidak saja di Indonesia tetapi juga di luar negeri dalam hubungan multilateral. Nama Batam barangkali sama dikenalnya dengan Bali dan Jakarta. Yang membedakan antara ketiga daerah tersebut adalah Batam sebagai daerah industri terkenal, Bali sebagai daerah industri pariwisata nomor satu di Indonesia, dan Jakarta sebagai pusat pemerintahan.

Kemudian berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 34 tahun 1983 dibentuklah Pemerintah Kotamadya Batam yang pada tahun 1999 berubah menjadi Kota Batam berdasarkan UU Nomor 22/1999 tentang Otonomi Daerah. Jauh sebelum terbentuk Kota Batam, di wilayah ini telah ada Otorita Batam (OB) yang dibentuk melalui Keppres Nomor 41/1973 yang tugasnya adalah membangun dan mengembangkan kawasan industri Batam.

Selanjutnya melalui Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2005, Kota Batam dimekarkan menjadi 12

kecamatan. Termasuk dalam kawasan *Free Trade Zone* (FTZ) adalah Kecamatan Lubuk Baja, Batam Kota, Sei Beduk, Nongsa, Sekupang, Batu Aji, Sagulung, Bengkong, Batu Ampar dan Galang yang kesemuanya terletak di gugus Pulau Batam, Rempang dan Galang, selanjutnya dipopulerkan dengan akronim Bareleng.

Sedangkan dua kecamatan, yakni Kecamatan Bulang dan Kecamatan Belakang Padang berada di luar kawasan FTZ dan termasuk kawasan *hinterland*. Kecamatan Belakang Padang berada di Pulau Belakang Padang dan Kecamatan Bulang berada di Pulau Buluh.

SELAYANG PANDANG BELAKANG PADANG

Secara historis Belakang Padang merupakan Ibukota Kecamatan Batam ketika masih berada di bawah Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Riau (Asisten Wedana) dan merupakan kecamatan tertua yang hampir terlupakan dari gerak pembangunan Kota Batam.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 1983 tanggal 24 Desember 1983 Wilayah Kecamatan terpecah menjadi tiga bagian Kecamatan yaitu : Kecamatan Batam Barat, Kecamatan Batam Timur dan Kecamatan Belakang Padang sendiri, sesuai Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 4 Tahun 2002 tentang perubahan status Desa menjadi Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Batam tahun 2002 Nomor 20 Seri D), Desa di Kecamatan Belakang Padang diubah status menjadi Kelurahan yaitu Kelurahan Belakang Padang, Kelurahan Pulau Terong, Kelurahan Pecong, Kelurahan Kasu dan Kelurahan Pemping.

Kemudian berdasarkan Perda Kota Batam Nomor 2 tahun 2005 tentang Pemekaran, Perubahan dan

Pembentukan Kecamatan dan Kelurahan dalam daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam tahun 2005 Nomor 65 Seri E) Belakang Padang mengalami perubahan pada tingkat Pemerintahan Kelurahan, yang semula lima Kelurahan menjadi enam Kelurahan yaitu :

1. Kelurahan Sekanak Raya ;
2. Kelurahan Tanjung Sari ;
3. Kelurahan Pulau Terong ;
3. Kelurahan Pemping ;
4. Kelurahan Kasu ;
5. Kelurahan Pecong

Kecamatan Belakang Padang memiliki luas laut lebih besar dari daratan dengan luas daratan 69,12 KM² dan luas lautan 512,428 KM² (Bidang Pemutaran Dasar Rupabumi – PDRTR- Bakosurtanal TA 2006)

Seiring dengan kemajuan Pulau Batam sebagai sebuah kota industri di kawasan *bonded* atau *mainland*, tampak begitu kontras apabila dibandingkan dengan perkembangan dan pembangunan di Kecamatan Belakang Padang. Tidak berlebihan jika dikatakan kawasan Belakang

Padang masih tertinggal atau ditinggalkan dan terbelakang apabila dibandingkan dengan Batam.

Apabila mempunyai kesempatan dan ringan langkah ketika berada di Batam, datang dan tengoklah pulau kecil di bagian barat daya Pulau Batam. Untuk dapat sampai ke Kecamatan Belakang Padang rute yang paling mudah adalah melalui pelabuhan Sekupang.

Dari pelabuhan Sekupang tepatnya di dermaga lokal Pulau Belakang Padang dapat diakses dengan membeli tiket sebesar tiga belas ribu rupiah atau mencarter *pancong* sebesar 120 ribu rupiah, kemudian kita akan diantar ke Kecamatan Belakang Padang yang kantornya berada di Pulau Sekanak. Pulau Belakang Padang dan Sekanak telah disatukan dengan jembatan.

Perjalanan reguler menggunakan ke wilayah ini menggunakan sebuah *pancong* yang biasanya diisi delapan penumpang dan seorang *penambang (tekong)*, istilah untuk pengemudi *pancong*. Sedangkan kalau dicarter dapat diisi sekehendak pencarternya tetapi umumnya berkisar dua sampai empat orang.

Menempuh jarak yang tidak terlalu jauh dan memakan waktu 12 - 18 menit dari pelabuhan Sekupang

akan sampai di Pulau Belakang Padang. Jumlah pancung yang melayani rute Sekupang - Belakang Padang setiap harinya sebanyak 300 - an pancung dengan sistem antrean atauurut nomor kecuali dalam keadaan tertentu sistem ini tidak berlaku.

Sebelum sampai ke pelabuhan (*pelantar*) dan pancung merapat untuk menurunkan penumpang, para penumpang dapat melihat rentetan rumah di atas laut yang berjajar rapi di sebelah kiri yang merupakan perkampungan nelayan sebagian besar berada dalam wilayah Kampung Bugis.

Sedang di sebelah kanan akan terlihat Pulau Sambu dengan bangunan bunker-bunker bahan bakar minyak milik Pertamina. Begitu mendekati pelantar akan terlihat rumah-rumah tinggi terbuat dari kayu di pinggir-pinggir laut, pasar, ruko yang berjajar sepanjang pelantar.

Tiba di darat sejumlah penarik becak yang umumnya merupakan migran dari daerah banyumas Jawa Tengah dan ojek umumnya merupakan penduduk asli Belakang Padang - sebagian merupakan para nelayan yang alih profesi ketika tidak melaut - sudah menunggu

penumpang di pinggir jalan. Jika tidak ingin naik becak atau ojek, dapat ditempuh dengan jalan kaki.

Jangan berpikir ada angkutan kota atau taksi seperti di Batam atau kendaraan roda empat milik pribadi yang bakal menjemput penumpang. Selama penelitian ini dilakukan hanya terlihat satu mobil boks pengangkut sampah.

Di Belakang Padang hanya ada dua alat transportasi, yaitu becak dan ojek sehingga ketika Menteri Pemberdayaan Perempuan zaman Presiden Gus Dur, Chofifah Indraparawangsa berkunjung ke Belakang Padang pun harus naik becak. Hal yang sama juga berlaku untuk pejabat baik daerah maupun pusat yang ingin berkunjung ke daerah ini. Dengan hanya dua alat transportasi tersebut tak perlu heran apabila kondisi aspal jalannya terawat dengan baik dan jarang ditemukan lubang-lubang.

Begitu melewati pelantar dan masuk daratan Belakang Padang, di sebelah kanan kiri berjajar berbagai pertokoan yang jumlahnya sekitar 90 toko dan ruko. Jenis pertokoan yang ada cukup besar dengan barang dagangan yang beragam sebagaimana sebuah pertokoan yang ada

di kota-kota. Sebagian pertokoan itu milik orang-orang dari etnis Cina, Minang, Melayu, dan Jawa.

Di belakang pasar sebelah kanan adalah pasar Belakang Padang dengan jumlah kedai sebanyak sekitar 130-an. Pasar Belakang Padang merupakan pasar terbesar di Kecamatan Belakang Padang dan merupakan pusat perkulakan bagi orang-orang desa yang ada di wilayah ini. Sedangkan di sebelah belakang pertokoan sebelah kiri merupakan perkampungan yang padat penduduknya.

Di pintu masuk daratan Belakang Padang ini terletak beberapa perkantoran seperti Polsek, Lanal, Imigrasi, masjid yang megah dan sekolahan.

Daerah pertokoan dan pasar ini merupakan sentra keramaian hingga malam hari dan merupakan konsentrasi berbagai aktivitas termasuk Pujasera atau kegiatan lain yang bernuansa hiburan, minum-minum, bilyard dan sebagainya.

Setelah melewati daerah ini kita dapat meneruskan perjalanan lurus ke utara atau belok ke kiri menuju Pulau Sekanak. Di kanan kiri jalan merupakan perkampungan yang padat kecuali setelah melewati jembatan

penghubung Pulau Belakang Padang dengan Pulau Sekanak.

Pulau Belakang Padang juga dihubungkan dengan Pulau Molawa. Di sebelah Pulau Belakang Padang terdapat Pulau Mat Belanda yang sebagian besar rumah tangganya bergerak di sektor jasa, yakni dunia hitam prostitusi.

Untuk mengelilingi pulau kecil ini cukup naik ojek atau becak. Dalam tempo satu jam dengan kecepatan 20 kilometer per jam sudah dapat menikmati sekeliling pulau dengan santai. Bentuk jalannya melingkar, tetapi diselangselingi jalan agak menanjak dan perbukitan yang di sisi kanan kirinya masih banyak pepohonan.

Jika akan menelusuri seluruh Kecamatan Belakang Padang, mau tidak mau harus berkunjung ke Desa Kasu, Pecung, Pemping, dan Terung. Untuk dapat sampai ke desadesa tersebut dapat menyewa pancung ataupun ikut *pompong* reguler. Dari Belakang Padang kalau ingin ke Kelurahan Kasu misalnya dapat mencarter pancung dengan harga berkisar 150 hingga 200 ribu sekali jalan.

Dengan menempuh waktu sekitar 45 menit dapat tiba di Kasu. Namun apabila ingin hemat dapat ikut

pompong yang tiap hari hanya jalan sekali, yakni sekitar pukul sebelas siang. Kemudian jika sudah sampai di Kasu harus menginap dan dapat kembali ke Belakang Padang esok harinya sekitar pukul tujuh pagi.

Orang yang pulang pergi ke Kasu dari Belakang Padang umumnya bersamaan dengan orang-orang Kasu yang sekolah atau belanja dan kulakan di pasar Belakang Padang. Mereka berlabuh dan berangkat dari pelantar yang berbeda dengan pelantar pancung rute Sekupang – Belakang Padang .

Pelantar yang digunakan untuk berlabuh pompong kondisinya terlihat sederhana, terbuat dari kayu dan cukup sulit untuk naik maupun turun dari pompong. Berbeda dengan pelantar Sekupang – Belakang Padang yang sudah diaspal halus dan mempunyai dermaga yang memadai untuk naik turun penumpang.

Demikian pula jika ingin berkunjung ke Pulau Pecung, Terung, maupun Pemping. Jika ingin menyewa atau mencarter *pancung* jelas biayanya sangat mahal, tetapi jika ingin ikut *pompong* biayanya cukup murah, hanya saja jadwal perjalannya hanya sekali sehari. Kalau terlambat sedikit saja maka kita akan tertinggal.

Dari keempat kelurahan yang ada di Kecamatan Belakang Padang, Pulau Terung merupakan kelurahan yang letaknya paling jauh dari ibukota kecamatan di Belakang Padang. Sedangkan desa yang paling dekat dengan ibukota kecamatan Belakang Padang adalah Desa Pemping.

Sebagaimana Kelurahan Belakang Padang yang mempunyai wilayah beberapa pulau, kelurahan di Kecamatan Belakang Padang juga mempunyai wilayah yang terdiri dari puluhan pulau-pulau.

Dari data statistik Kecamatan Belakang Padang diperoleh diketahui, Kelurahan Pulau Terung mempunyai wilayah enam pulau yang berpenghuni dan 14 pulau tak berpenghuni, Kelurahan Pecung terdiri dari dua pulau berpenghuni dan 16 pulau tak berpenghuni, Kelurahan Kasu terdiri 12 pulau yang berpenghuni dan 21 pulau tak berpenghuni, Kelurahan Pemping mempunyai wilayah 4 pulau berpenghuni dan empat pulau tak berpenghuni.

Sedangkan Kelurahan Belakang Padang sendiri yang juga ibukota kecamatan mempunyai 18 pulau yang berpenghuni dan 10 pulau tak berpenghuni.

YANG DITINGGALKAN DAN TERTINGGAL

Membandingkan kemajuan yang diraih Batam dengan Belakang Padang memang terasa tak logis dan *absurd*. Perbedaan pembangunan dapat diibaratkan bumi dan langit atau siang dan malam.

Tetapi apabila membandingkan dengan pendekatan historis Belakang Padang sebagai “saudara kandung” Kota Batam di kawasan perdagangan bebas, tentu layak untuk diperhatikan. Apalagi di lain pihak letak Kecamatan Belakang Padang sangat strategis karena berdekatan dengan dan langsung berhadapan dengan negara tetangga Singapura.

Jaraknya ke Singapura hanya sekitar tujuh mil dan dapat ditempuh dalam waktu sekitar 15 – 20 menit dengan kapal feri. Sementara dari Batam (Sekupang) ke Singapura jaraknya sekitar 13,3 mil yang dapat ditempuh dengan feri sekitar 30 – 45 menit.

Bagi masyarakat Batam khususnya, nama Pulau Belakang Padang sudah tak asing lagi. Pulau yang mempunyai daratan seluas 4.202,61 hektar persegi ini

dikenal bukan karena di sana masih terdapat berkumpulnya masyarakat Suku Laut dan masyarakat *hinterland* tempatan. Bukan pula karena transportasi lewat laut menggunakan sampan *pancung* atau sekadar menjadi bagian dari salah satu kecamatan di Kota Batam.

Lebih dari itu, Pulau Belakang Padang yang merupakan ibukota kecamatan ini mempunyai hubungan historis yang tak dipisahkan dari Batam sebagai bagian gugusan Pulau Belakang Padang. Sebab lahirnya Batam sebagai sebuah kawasan industri terkemuka di Tanah Air ini tak lepas dari keberadaan Belakang Padang di masa lalu sebagai embrio atau cikal bakal Batam sekarang.

Jauh sebelum Batam dikelola oleh Otorita Batam dengan Keppres Nomor 41/1973 (sekarang Badan Pengusahaan - BP Batam) dan menjadi sebuah kota otonom yang dipimpin oleh seorang walikota, Belakang Padang merupakan pusat kota kecamatan dari Kabupaten Kepulauan Riau, Provinsi Riau. Batam sendiri adalah bagian dari desa dari Kecamatan Belakang Padang yang pada tahun 1971 hanya dicatat berpenghuni 6.000 jiwa.

Ketika Batam masih menjadi sekumpulan hutan belantara, sejak tahun 1950-an Belakang Padang sudah

dikenal sebagai pulau kecil yang telah membuka diri dalam bidang perdagangan, hasil-hasil tangkapan ikan, pertanian seperti sayur-sayuran, kelapa diperjualbelikan ke Pulau Sambu yang ketika itu dikenal sebagai pusat logistik suplai bahan bakar minyak milik Pertamina.

Sehari-hari para nelayan yang berada di Belakang Padang bukan hanya menjual dan memasarkan tangkapan ikannya dari laut kepada penduduk di sekitar pulau - pulau kecil atau ke Sambu yang berjarak sekitar satu mil, tetapi sebagian nelayan banyak yang menjual dan memasarkan ikannya langsung ke Singapura.

Pak Musa Jantan, salah seorang tokoh masyarakat Bugis yang pernah diwawancarai di rumahnya Kampung Bugis mengatakan bahwa masyarakat nelayan cukup makmur karena kedekatannya dengan Singapura.

“Dulu Singapura menjadi sasaran perdagangan ikan bagi nelayan di Belakang Padang. Tanpa harus menggunakan paspor kami dapat memasuki ke perairan Singapura untuk menjual ikan. Sehari dari hasil tangkapan ikan yang kemudian dijual ke Singapura dapat memperoleh sebanyak 300 hingga 1000 Dolar Singapura. Kalau sekarang, jangankan Dolar, Rupiah pun sulit diperoleh dari hasil ikan”.

Apa yang dikatakan oleh Pak Musa Jantan yang sudah berumur dan bekas seorang nelayan ini banyak diamini oleh nelayan - nelayan saat ini. Akibat adanya kerukan pasir, pencemaran laut, rusaknya ekosistem kelautan dan penangkapan yang berlebihan, saat ini banyak nelayan Belakang Padang yang mengalami kesulitan memperoleh tangkapan ikan.

Bahkan banyak nelayan yang mengatakan bahwa dulu para nelayan yang menjual dan memasarkan ikannya ke Singapura sekaligus dapat berbelanja kebutuhan sehari - hari dari Singapura. Masyarakat Belakang Padang relatif bebas keluar masuk Singapura untuk melakukan transaksi jual beli dan bahkan ada yang memanfaatkan untuk memupuk kekayaan.

Namun sejak pusat perdagangan dipindahkan ke Batam yang disertai pembangunan Batam sebagai kawasan industri paling maju, pelan tapi pasti Kecamatan Belakang Padang ditinggalkan dan kemudian menjadi jauh tertinggal apabila dibandingkan dengan Batam sekarang.

Keputusan politik dan perkembangan ekonomi struktural yang terjadi di Batam jauh meninggalkan perkembangan Belakang Padang. Banyak masyarakat di

Belakang Padang mengatakan *habis manis sepah dibuang* untuk menggambarkan bagaimana dulu Belakang Padang berjasa dalam merintis aspek pemerintahan di Batam dan setelah Batam maju, Belakang Padang agak tersisihkan.

Kecamatan Belakang Padang tidak saja ditinggalkan secara politis, tetapi juga secara ekonomi maupun sosial. Jika pada masa lalu Belakang Padang merupakan pusat pemerintahan kecamatan yang juga membawahi Batam dan merupakan pusat aktivitas ekonomi, saat ini tidak lagi. Belakang Padang bukan lagi menjadi pusat ekonomi di mana penduduk di dalamnya dapat menggantungkan hidupnya di wilayah ini.

Keputusan politik untuk mengembangkan Batam sebagai kawasan industri terkemuka telah menggeser fungsi Belakang Padang sebagai sumber ekonomi sehingga pelan tapi pasti perkembangan perekonomian menjadi tertinggal jauh apabila dibandingkan dengan Batam.

Dalam bidang sosial juga demikian. Dengan menggunakan indeks sosial yang ada, salah satunya pendidikan, kesehatan, kondisi sosial Belakang Padang

terlihat pada posisi yang inferior dibanding Batam pada wilayah *mainland*.

BELAKANG PADANG DALAM KONFIGURASI ANGKA

Kondisi Geografis

Belakang Padang secara geografis mempunyai letak yang sangat strategis, yaitu terletak di jalur pelayaran internasional antara $103^{\circ}51$ Lintang Utara dan $13^{\circ}30$ Bujur Timur dengan total wilayah darat 69, 120 Km² dan wilayah laut seluas 512,428 Km² sehingga total keseluruhan seluas 581, 548 Km² dan berbatasan dengan :

1. Utara : Selat Philip (Pelayaran Internasional)
2. Selatan : Kecamatan Moro (Kab. Karimun)
3. Barat : Kabupaten Tanjung Balai Karimun
4. Timur : Kecamatan Sekupang

Dalam struktur pemerintahan Kecamatan Belakang Padang yang semula terdiri dari lima Kelurahan mengalami perubahan sesuai Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 tahun 2005 tentang Pemekaran, Perubahan dan

Pembentukan Kecamatan dan Kelurahan dalam Daerah Kota Batam menjadi enam Kelurahan, yaitu :

1. Kelurahan Tanjung Sari ;
2. Kelurahan Sekanak Raya ;
3. Kelurahan Pemping ;
4. Kelurahan Pecong ;
5. Kelurahan Kasu ;
6. Kelurahan Pulau Terong.

Perekonomian Rakyat dan Pasar

Dilihat dari pergerakan perekonomian di wilayah Kecamatan Belakang Padang, sebagian besar berada di wilayah Belakang Padang (pusat perekonomian), sehingga bagi masyarakat yang berada di pulau-pulau di luar Belakang Padang otomatis bertemu di pasar tersebut.

Sementara pasokan barang-barang secara keseluruhan dari Batam melalui kendaraan laut (kapal dan pancung) berpengaruh terhadap harga kondisi pasar yang yakni:

1. Harga lebih tinggi karena ditambah biaya pengangkutan laut dan darat via Batam dan Tanjung Pinang atau Bintan;

2. Kualitas barang dapat mempengaruhi akibat buruknya cuaca jika pada saat bongkar muat terjadi hujan.

Kependudukan

Penyebaran penduduk per kelurahan di Kecamatan Belakang Padang tidak merata dalam arti terkonsentrasi di pulau Belakang Padang sebesar 57 % dari jumlah penduduk secara keseluruhan sebanyak 21.608 jiwa pada tahun 2014.

Komposisi jumlah penduduk per Kelurahan di Kecamatan Belakang Padang untuk tahun 2015 dapat dirinci sebagai berikut: Kelurahan Sekanak Raya (29,79 %), Tanjung Sari (28,32 %), Pulau Terong (17,01 %), Kasu (16,10 %) dan Pecong (4,12 %).

Prasarana dan Sarana Daerah

Belakang Padang dengan luas lautnya lebih besar berbanding darat, menyebabkan lebih banyak masyarakat mempergunakan transportasi laut sebagai sarana penghubung untuk menuju daerah yang ditempuh, sebagaimana dapat dilihat tabel di bawah ini :

**Tabel Prasarana Transportasi
Kecamatan Belakang Padang Tahun 2013**

No	Uraian	Prasarana	Volume	Armada
1.	Lalu lintas melalui darat 30 %	<ul style="list-style-type: none"> · Jalan Aspal · Jalandiperkeras/semenisasi · Jalan Tanah 	7,00 Km 17,50 Km 19,00 Km	Mobil Sepeda Motor Becak sepeda
2.	Lalu lintas melalui laut 70 %	Dermaga	21,00 Bh	Kapal Fery Motor air Boat Pancung

Sumber: Profil Kecamatan Belakang Padang Tahun 2013

Perumahan dan Toko

Dari jenis perumahan yang dimiliki masyarakat bisa dilihat rekapitulasi per Kelurahan sebagaimana tabel berikut ini :

Rekapitulasi Data Perumahan dan Toko

NO	KELURAHAN	JUMLAH		JUMLAH		JUMLAH RUKO
		RW	RT	RUMAH	TOKO	
1.	Sekanak Raya	6	20	1.306	77	1.383
2.	Tanjung Sari	6	21	1.347	59	1.406
3.	Kasu	6	22	1.067	50	1.117
4.	Pemping	2	5	199	15	214
5.	Pecong	2	5	198	12	210
6.	Pulau Terong	5	14	735	55	790
KECAMATAN		27	87	4.862	268	5.120

Sumber: Profil Kecamatan Belakang Padang Tahun 2013

Perhubungan Laut

Lalu lintas melalui laut merupakan salah satu sarana yang sangat penting karena yang sangat penting karena berkaitan dengan mobilitas barang dan orang dari dan ke Belakang Padang, perkembangan arus barang yang datang dari Batam secara keseluruhan diangkut dengan *pancong* sebagai sarana kebutuhan primer dan sekunder di Belakang Padang.

Telekomunikasi dan Informasi

Keberadaan fasilitas Telekomunikasi yang ada di Belakang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Fasilitas Telekomunikasi

No	Kelurahan	Penvedia Lavanan
1	Tanjung Sari	1. Telkom
2	Sekanak Raya	2. Telkomsel
3	Kasu	3. Indosat
4	Pemping	4. Hutchison CP Telecommunications
5	Pecong	-
6	Pulau terong	Indosat Telkomsel

Sumber: Profil Kecamatan Belakang Padang Tahun 2013

Energi Listrik

Untuk wilayah Belakang Padang penyediaan ketenagalistrikan yang dikelola PLN, jumlah tenaga listrik yang dibangkitkan dengan daya terpasang di Belakang Padang dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Jumlah Pembangkit Tenaga Listrik

No	Lokasi	Jml Mesin	Daya Terpasang	Tenaga yang dibangkitkan
1.	PLN Bel. Padang	4 Buah	1.520 Kw	6.379.110 Kwh
2.	PLN Kasu	2 Buah	200 Kw	401.155 Kwh
3.	PLN Pecong	1 Buah	100 Kw	74.228 Kwh
4.	PLN Pl. Terong	2 Buah	200 Kw	385.633 Kwh

Sumber: Profil Kecamatan Belakang Padang Tahun 2013

Air Bersih

Pengadaan dan pengelolaan air bersih di Belakang Padang di kelola oleh Pemerintah Kota Batam (Dinas Pemukiman Prasarana Wilayah), sumber air bersih berada di Pulau Sekanak, yaitu Waduk Sekanak I dan waduk Sekanak II, kapasitas tampung waduk sebesar 9,4 Ha dengan kapasitas pengelolaan sebesar 15 lt/dt sebagaimana dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Fasilitas Air Bersih

No	Nama Waduk	Kapasitas Tampung (lt/det)	Kapasitas Pengolahan (Lt/Det)
1	Sekanak I	5,4	10
2	Sekanak II	4,0	5
3	Pemping		

Sumber: Profil Kecamatan Belakang Padang Tahun 2013

Pemekaran Wilayah

Meningkatnya jumlah penduduk Kota Batam yang tidak seimbang dengan bertambahnya fasilitas umum, sosial dan ekonomi, kemudian melalui Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pemekaran, Perubahan dan Pembentukan Kecamatan dan Kelurahan dalam daerah Kota Batam pada tanggal 30 September 2005, berdasarkan Peraturan Daerah tersebut, penataan wilayah Kecamatan Belakang Padang mengalami perubahan menjadi enam Kelurahan dari lima Kelurahan sebelumnya.

Kesehatan Masyarakat

Di bidang kesehatan masyarakat, Kecamatan Belakang Padang belum mempunyai rumah sakit. Yang dimiliki hanya sebuah Puskesmas, delapan Puskesmas pembantu yang berada di Kasu, Pemping, Pecung dan Terong dan beberapa Puskesmas keliling, terdapat lima Puskesmas Kelililing, enam Polindes dan 29 Posyandu.

Data dari Dinas Kesehatan Kota Batam (2014) di Kecamatan Belakang Padang tercatat sebanyak tiga orang dokter umum, 1 orang dokter gigi, 19 orang bidan dan 19 perawat.

Dengan konfigurasi fasilitas kesehatan yang demikian maka banyak penduduk yang mengeluh karena kurangnya fasilitas kesehatan sehingga kalau mengalami sakit yang cukup serius masyarakat sangat kesulitan untuk memperoleh pelayanan kesehatan. Mereka harus lari ke Batam yang tentu saja membutuhkan biaya pengobatan yang sangat mahal.

Dalam kondisi ekonomi rumah tangga yang rata-rata sederhana tentu saja hal ini menjadi masalah yang cukup serius bagi masyarakat di Belakang Padang khususnya masyarakat di pulau-pulau.

Rendahnya indeks kesehatan akan menjadi kendala bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia sehingga upaya untuk mengejar ketertinggalan dan keterbelakangan melalui perbaikan kualitas kesehatan pun akan banyak menghadapi kendala.

Kondisi Pendidikan

Persoalan serius untuk mengejar ketertinggalan adalah di dunia pendidikan. Pendidikan di manapun diyakini sebagai salah satu instrumen yang cukup ampuh untuk mengejar ketertinggalan dan keterbelakangan suatu masyarakat.

Melalui pendidikan kualitas hidup akan dapat diperbaiki dan memberikan peluang terjadinya mobilitas vertikal bagi masyarakat. Namun kondisi dunia pendidikan di Kecamatan Belakang Padang nampaknya belum dapat dijadikan instrumen untuk mengejar ketertinggalan. Justru dunia pendidikan di Kecamatan Belakang Padang memang belum selengkap wilayah *mainland*.

Melalui tabel berikut ini, kita dapat melihat merinci bahwa di Kecamatan Belakang Padang terdapat 14 Sekolah SD Negeri, 2 Madrasah Ibtidaiyah (MI) milik swasta, 6 SMP

Negeri, 1 MTs Negeri, 1 Mts Swasta, 3 buah SMA Negeri dan 1 MA Swasta. bagaimana kondisi sarana dan prasarana pendidikan di Kecamatan Belakang Padang. Jumlah TK yang ada dengan jumlah murid sekitar 200 siswa, itupun hanya ada di ibukota kecamatan. Jumlah SD cukup lumayan karena hampir di setiap desa terdapat minimal 2 SD.

Sekolah Dasar yang terbanyak ada di Belakang Padang dan Desa Kasu yang masing-masing mempunyai 6 SD. Jumlah keseluruhan SD yang ada sebanyak 21 buah dengan jumlah guru 63 orang dan siswa sebanyak 2.497 orang.

Gambaran kualitas sumber daya manusia di kawasan *hinterland* khususnya Belakang Padang juga dapat dilihat dari penduduk yang menamatkan pendidikan formalnya. Dilihat dari tingkat pendidikan yang ditamatkan di kawasan ini ternyata 8.855 jiwa (49,21 %) penduduk tidak tamat SD.

Yang dapat menamatkan SD berjumlah 4.886 jiwa (27,15%); tamat SLTP sebanyak 1949 jiwa (10,83%), tamat SLTA sebanyak 2016 orang (11,20%) dan yang dapat menamatkan perguruan tinggi sebanyak 288 jiwa (1,60%).

Fasilitas Publik

Di Belakang Padang terdapat sarana gedung kesenian yang bernama gedung Indra Sakti dan sebuah lapangan sepak bola. Kemudian ada dua tempat pusat jajan serba ada (Pujasera) seperti di Batam dan empat penginapan losmen/hotel melati. Selain itu sarana telekomunikasi seperti telepon atau handphone juga dapat diakses. Listrik dari PLN dan air bersih dari dam yang dibangun pemerintah.

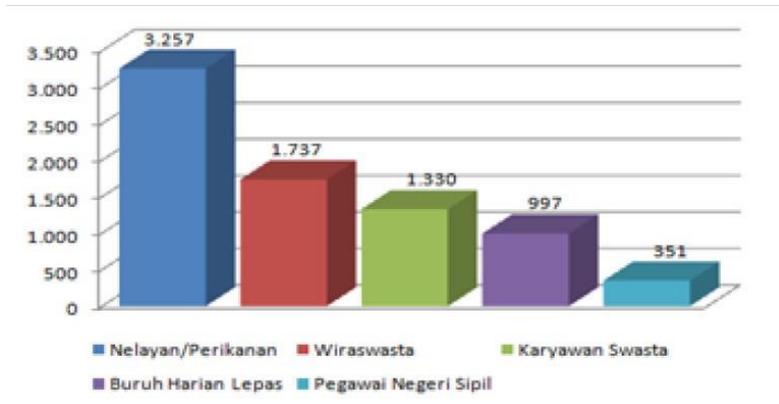
Mata Pencarian

Dari sisi mata pencarian umumnya penduduk di Kecamatan Belakang Padang bekerja sebagai nelayan yang jumlahnya mencapai 2280 orang (38,06 %) dari total penduduk yang bekerja yaitu sebanyak 5991 jiwa.

Disusul kemudian sektor jasa sebanyak 639 jiwa (10,67 %); sektor perdagangan, hotel dan restoran sebanyak 522 jiwa (8,71 %), sektor bangunan/konstruksi sebanyak 410 jiwa (6,84 %) kemudian berturut-turut sektor angkutan dan komunikasi 4,81 %, pertambangan, lembaga keuangan dan listrik/gas. Sedangkan sebanyak 1414 jiwa

(23,60 %) seperti PNS, TNI/POLRI, buruh bangunan dan lainnya.

*Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencarian
Tahun 2013*



Sumber: BPS Kota Batam, 2015

Dilihat dari komposisi penduduk menurut mata pencarian, khusus untuk Kelurahan Belakang Padang memang yang terbesar adalah nelayan namun komposisinya tidaklah sedominan desa-desa seperti Kasu, Terong, Pecung, dan Pemping yang hampir 90 persen mempunyai mata pencaharian pertanian/nelayan.

Yang menjadi masalah dan sering dikeluhkan masyarakat di Kecamatan Belakang Padang adalah

mengapa mereka sama-sama masuk wilayah Kota Batam tetapi memperoleh perlakuan yang berbeda. Apabila di Batam diperlakukan bebas pajak, tetapi mengapa di kawasan *hinterland* mereka seperti seperti daerah lainnya. Masyarakat di Belakang Padang terpaksa menggunakan hasil pedapatannya dalam bentuk rupiah dengan belanja dengan dolar.

“Ini yang membuat warga Belakang Padang cemburu dengan Batam. Semua barang masuk dikenakan pajak. Harga jadi mahal, padahal kami juga bagian dari Batam”, kata Ketua Putra Batam *Hinterland* Belakang Padang.

Dari aktivitas mata pencarian yang sebagian besar nelayan, kontribusi kawasan *hinterland* Belakang Padang dalam menyumbangkan produk perikanan cukup tinggi. Besarnya produksi perikanan dapat dilihat pada tabel berikut :

Statistik Perikanan di Kecamatan Belakang Padang Tahun
2013 - 2104

Uraian	Tahun	
	2013	2014
Perikanan Laut		
Produksi (Ton)	3.216	3.473
Nilai Produksi (dalam Juta rupian)	107.131	118.091
Perikanan Budidaya Laut		
Produksi (Ton)	450	280
Nilai Produksi (dalam juta rupian)	20.542	22.107

*Sumber: Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan
Kehutanan Kota Batam*

Dilihat dari hasil produksi perikanan yang dihasilkan terlihat bahwa produksi perikanan dari tahun ke tahun mengalami banyak penurunan dibandingkan dengan hasil produksi perikanan pada tahun sebelumnya.

Banyak faktor yang menyebabkan mengapa produksi perikanan mengalami fluktuasi, antara lain

rusaknya ekosistem laut, adanya pengerukan pasir, rusaknya hutan bakau, dan penurunan kualitas air.

Sekalipun demikian kawasan *hinterland* Belakang Padang ini tetap sebagai sentra perikanan yang menyumbang produksi terbesar di kawasan Batam.

Tingginya produksi perikanan di Belakang Padang disebabkan oleh lokasi tempat berbagai ikan berkumpul juga adanya perkembangan alat tangkap ikan yang terus meningkat dibandingkan dengan daerah lainnya.

Kendati diakui bahwa kawasan Belakang Padang menjadi sentra produksi perikanan, namun kehidupan nelayan saat ini tidak beranjak baik apabila dibandingkan dengan kehidupan nelayan masa lalu.

“Dulu pada tahun 1980-an kehidupan nelayan di Belakang Padang cukup makmur, namun kini sangat memprihatinkan”.

Demikian diungkapkan salah satu Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Belakang Padang Hamid Abdullah. Suatu keprihatinan yang mencerminkan betapa kehidupan di Belakang Padang kini jauh tertinggal dan terbelakang apabila dibandingkan dengan kehidupan di Batam.

POTENSI KECAMATAN BELAKANG PADANG

Dalam Materi Teknis Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Kawasan Belakang Padang, potensi Kawasan Belakang Padang dibedakan menjadi dua yaitu potensi fisik dan potensi non fisik.

Potensi Fisik

1. Pulau Belakang Padang memiliki *view* yang khas sebagai kawasan batas air;
2. Kawasan Pulau Belakang Padang memiliki aksesibilitas yang mudah dan cepat dari Pulau Batam;
3. Ukuran yang kecil membuat kawasan ini kompak dan dapat menjadi kawasan yang berkarakter permukiman yang khas dan unik;
4. Pulau Belakang Padang memiliki sumber daya alam yang indah sebagai modal untuk menjadi kawasan pariwisata;
5. Infrastruktur darat yang ada masih memadai untuk menampung jenis transportasi yang umum

digunakan di sana, antara lain ojek, becak dan hanya dua buah kendaraan mobil yaitu Puskesmas dan mobil sampah;

6 Potensi keindahan panorama kota Singapura.

Potensi Non Fisik

Karakter masyarakat yang heterogen serta sebagian besar bermata pencaharian nelayan dan sebagian lagi bercocok tanam berpotensi menjadikannya kawasan yang *sustain* (mandiri) bahkan menjadi kawasan pemasok sumber daya pangan bagi kawasan sekitarnya.

1. Pulau Belakang Padang mulai dikunjungi pendatang untuk berpariwisata;
2. Pulau Belakang Padang memiliki kegiatan budayatahunan sebagai event yang mendatangkan pengunjung serta dapat menjadi pencetus aktivitas budaya lainnya dan berbagai fasilitas pendukung pariwisata lainnya;
3. Adanya potensi budaya *heritage* yang dapat menjadi potensi dan dikembangkan menjadi ciri khas kawasan, yaitu permainan tradisional gasing.

Selain itu terdapat beberapa potensi lain di Kecamatan Belakang Padang ini seperti sektor industri kerajinan kecil, sektor pertanian, sektor perdagangan, dan sektor pariwisata. Potensi sektor industri berupa industri kerajinan rumahan (*home industry*) salah satunya seperti Rumah Kerang yaitu kerajinan dari kerang gonggong sebagai souvenir untuk buah tangan pengunjung.

Potensi sektor pertanian secara makro meliputi perikanan, peternakan, dan holtikultura. Hasil pertanian tanaman palawija di Kecamatan Belakang Padang ini berupa ketela pohon, ketela rambat, jangung, talas, dan kacang tanah. Sedangkan hasil pertanian sayur-sayuran terdiri dari cabe, ketimun, terung, kacang panjang, bayam, kangkung, sawi, paria, tomat, labu siam, dan pitula.

Potensi sektor perikanan terdiri dari perikanan laut dan budidaya laut. Kecamatan Belakang Padang yang luas perairannya lebih besar daripada luas daratannya menjadikan kawasan ini cocok untuk pengembangan wisata bahari.

Selain itu Kecamatan Belakang Padang dahulunya merupakan ibukota kecamatan Kota Batam yang tidak luput dari perkembangan Pulau Batam saat ini, serta kultur

budaya Melayu kepulauan yang masih melekat di masyarakat menjadikannya cocok untuk dikembangkan wisata sejarah dan peninggalan bersejarah (*heritage*).

KECAMATAN BULANG : POTRET LAMA YANG MENJADI BARU

Setelah berkeliling ke Belakang Padang, kawasan *hinterland* lain yang mempunyai potret ketertinggalan dan keterbelakangan yang sarana adalah Kecamatan Bulang yang termasuk kawasan *hinterland* Selatan Batam.

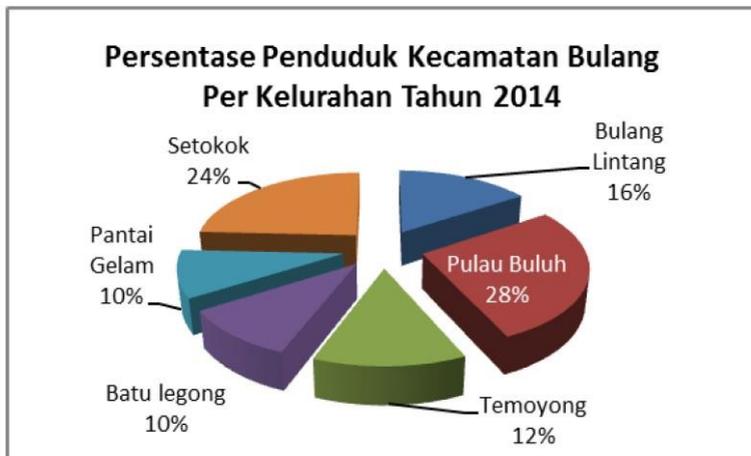
Kecamatan Bulang dengan luas wilayah 463 Ha yang terdiri dari enam Kelurahan yaitu Pantai Gelam, Temoyong, Pulau Setokok, Batu Legong, Bulang Lintang dan Pulau Buluh ini, juga memiliki kawasan perairan yang cukup luas, dengan jumlah penduduk sebanyak 11.484 jiwa (2014). Kelurahan dengan jumlah penduduk terbanyak adalah

Kelurahan Pulau Buluh dengan jumlah penduduk sebanyak 3.172 jiwa.

Persebaran penduduk di Kecamatan ini juga tidak merata. Terdapat 27,6% penduduk ada di Kelurahan Pulau Buluh, dan Kelurahan yang paling sedikit adalah Kelurahan Pantai Gelam, yaitu 9,7% penduduk Bulang bertempat tinggal di sana. Tingkat kepadatan penduduk yang

terpadat juga masih berada di Kelurahan Pulau Buluh dengan 1.455 jiwa per km², dan kepadatan penduduk yang terendah berada di Kelurahan Batu Legong yaitu, hanya 23 jiwa per km².

Hal ini dikarenakan Kelurahan Batu Legong adalah kelurahan terluas kedua setelah Bulang Lintang yang ada di Kecamatan Bulang yaitu mencapai 49,775 km² dan sebagian besar masih berupa hutan.



Sumber: BPS Kota Batam, 2015

Dari data yang diperoleh pada tahun 2014, jumlah Sekolah Negeri mulai dari TK yang tercatat mulai dari

tingkatan TK hingga SMA sebanyak 18 sekolah dan terdapat enam sekolah yang berstatus swasta.

Jika dilihat dari grafik maka dapat disimpulkan bahwa kebutuhan akan sarana pendidikan untuk waktu yang akan datang akan terus meningkat.

Jumlah Murid dan Guru di Lingkungan Dinas Pendidikan di Kecamatan Bulang Tahun 2014

Sekolah	Rasio Murid & Guru		
	Murid	Guru	Rasio
(1)	(2)	(3)	(4)
TK	130	35	4
SD	9.769	140	70
SMP	412	42	10
SMU	254	11	23
JUMLAH	10.555	229	46

Sumber Dinas Pendidikan Kota Batam

Daerah yang dikelilingi lautan menjadikan masyarakat di Kecamatan Bulang hampir semuanya menjadikan nelayan ataupun pembudidaya hasil laut sebagai mata pencarian.

Terdapat 1.447 Rumah tangga yang menjalankan Perikanan laut dengan hasil 1.476 ton dan 1.305 rumah tangga yang bergerak di budidaya laut dengan hasil 1.331 ton dengan hasil perikanan mencapai 5.880 ton dimana nilai produksi mencapai Rp 14 miliar (2007).

Kecamatan Bulang mempunyai pulau sebanyak 85 buah dengan 35 buah pulau yang berpenghuni sedangkan 50 pulau sisanya belum berpenghuni. Secara historis keberadaan Kecamatan Bulang yang beribukota di Pulau Buluh sebenarnya lebih tua dibandingkan dengan Belakang Padang atau Batam.

Jauh sebelum orang mengenal Belakang Padang dan Batam, Pulau Buluh pada tahun sebelum 1950-an telah menjadi pusat pemerintahan di daerah kepulauan sekitarnya. Berbagai peninggalan yang dapat dijadikan saksi bisu membuktikan bahwa dulu Pulau Buluh merupakan pusat pemerintahan.

Namun sejalan dengan perkembangan zaman dan makin ramainya Singapura maka pemerintahan dan pusat perekonomian di kawasan yang kini bernama *hinterland* tersebut dipindahkan ke Belakang Padang sekitar tahun

1970-an. Lebih-lebih setelah pemerintah pusat Jakarta menjadikan Pulau Sambu sebagai basis Pertamina.

Maka pelan tapi pasti konsentrasi dan perkembangan perekonomian beralih ke Belakang Padang. Demikian pula ketika keputusan politik menjadikan Batam sebagai pusat industri terkenal di tanah air, maka perkembangan perekonomian Belakang Padang pun beralih ke Batam. Apakah ini sebuah evolusi perkembangan ekonomi atau keputusan politik yang mengubahnya, perlu penjelasan yang komprehensif.

Jika orang akan pergi ke Kecamatan Bulang atau ke Pulau Buluh sebagai ibukota Kecamatan, dari Batam menuju pelabuhan Sagulung. Berbeda dengan pelabuhan internasional Sekupang yang cukup modern, pelabuhan Sagulung adalah pelabuhan kecil untuk domestik yang melayani kebutuhan antar desa.

Memang ada satu buah kapal besar yang seringkali singgah di Sagulung untuk kepentingan perdagangan ke dan dari Singapura. Namun secara umum pelabuhan Sagulung tidak seramai pelabuhan Sekupang atau Tanjung Pungkur yang melayani rute ke Kabupaten Kepulauan Riau.

Untuk dapat sampai ke Pulau Buluh ibukota Kecamatan Bulang, dari Batam menuju pelabuhan Sagulung dengan naik taksi secara beramai-ramai atau mencarter sendiri.

Sampai di pelabuhan Sagulung sudah banyak perahu pancung yang menunggu secara giliran. Perahu yang mendapat giliran langsung berangkat dahulu. Ongkos tiket untuk ke Pulau Buluh dari Sagulung hanya belasan ribu rupiah atau kalau dicarter biayanya bisa mencapai ratusan ribu rupiah. Dengan menempuh jarak yang tidak terlalu jauh dan hanya memakan waktu sekitar lima menit akan sampai di Pulau Buluh, ibukota Kecamatan Bulang.

Saat penelitian dilakukan tidak ada fasilitas pelantar yang memadai, namun saat ini tengah dibuat pelantar yang cukup baik. Untuk sementara apabila ingin ke Pulau Buluh berlabuh di pelantar milik orang yang bertempat tinggal di pinggir laut. Pulau Buluh juga dilalui lalu lintas antar kabupaten atau ke Singapura tetapi tidak setinggi Sekupang frekuensinya.

Ibukota Kecamatan Bulang yang terletak di Pulau

Buluh ini luasnya hanya sekitar 1,5 km persegi. Pulaunya kecil namun mempunyai dinamika kehidupan keseharian yang tinggi. Baik siang maupun malam hari suasana kehidupan selalu ramai, tak pernah sepi.

Jika pada siang hari banyak disibukkan dengan aktivitas formal seperti persekolahan, perkantoran dan perdagangan, maka pada malam hari akan disibukkan dengan dunia hiburan dan perjudian terutama yang dilakukan oleh orang-orang keturunan etnis tertentu.

Di depan Pulau Buluh terdapat sebuah pulau besar yang lebih dikenal sebagai Pulau Bulan. Di Pulau Bulan inilah yang konon milik orang Jakarta terdapat berbagai aktivitas ekonomi produksi yang cukup besar berupa pusat peternakan babi, penangkaran buaya, dan kebun anggrek.

Ke semua aktivitas produksi ekonomi di Pulau Bulan ini dikelola oleh PT. Indotirta Suaka. Ia mengelola Pulau Bulan dengan luas sekitar 1000 hektar. Daerah ini cukup terisolasi dan tidak setiap orang dapat masuk wilayah ini.

PT. Indotirta Suaka berdiri pada tahun 1984 dengan nama semula PT. Sinar Culindo Perkasa. Tahun 1989 nama itu diubah menjadi PT. Indotirta Suaka (PT. ITS) yang bergerak di bidang peternakan.

Kemudian berkembang perusahaan anakan yang diberi nama PT. Poultrindo Lestari dan PT. Piranti Gemilang. Mereka bergerak di bidang peternakan ayam, babi, buaya, serta perkebunan anggrek dan perikanan laut.

Dalam perkembangannya, peternakan babilah yang kemudian berkembang sangat pesat sebagai respon dari permintaan pasar di Singapura. Peternakan babi di Pulau Bulan ini mempunyai enam fase di mana setiap fasenya terdiri dari tujuh unit dan setiap unit terdapat enam kandang.

Setiap unit mampu menampung 6.300 ekor induk babi dengan populasi 60.000 ekor. Mulai Februari 1990 perusahaan peternakan babi ini sudah mampu mengekspor sebanyak 300.000 ekor babi ke Singapura setiap tahunnya dari kebutuhan keseluruhan di Singapura mencapai 1,3 juta per tahun.

Saat ini PT. ITS ditargetkan untuk mampu mengekspor babi sebanyak 600.000 ekor atau lebih per tahun. Bibit babi jenis Galor Braitwait, Lounwait dan L 24 Sintetif yang berasal dari AS, Inggris dan Kanada ini diekspor setelah enam bulan dipelihara dengan bobot 90 kilogram setiap ekornya.

PT. ITS memperkerjakan lebih dari 1.000 karyawan dengan gaji mengacu kepada Upah Minimum Kota (UMK). Hampir semua karyawannya berasal dari luar kecamatan Bulang.

Sebenarnya PT. ITS cukup terbuka untuk menerima warga sekitar menjadi karyawan, tetapi umumnya mereka tidak mau sekalipun sudah disediakan mess bagi karyawan lajang dan bagi yang sudah berkeluarga diminta tinggal di luar mess.

Alasan penolakan umumnya berkaitan dengan masalah ideologis dan keyakinan karena mayoritas penduduk di Kecamatan Bulang beragama Islam.

Masyarakat di Kecamatan Bulang juga pernah melakukan protes keras ke PT. ITS karena limbah industri peternakan yang dihasilkannya yakni berupa bau, sangat menyengat yang sangat tidak sedap dan mengganggu pernafasan.

Sebagai hasil dari protes masyarakat, PT. ITS akhirnya bersedia mengganti kerugian pada warga dan memberikan program *Community Development*.

KECAMATAN BULANG DALAM ANGKA

Sebagaimana disinggung pada uraian sebelumnya, Kecamatan Bulang adalah kecamatan yang terbilang baru secara legal formal. Sekalipun juga diketahui bahwa Pulau Buluh sebenarnya mempunyai latar belakang historis cukup parjang sebagai pusat pemerintahan.

Begitu kita memasuki darat Pulau Buluh di sepanjang kanan kiri jalan yang lebarnya empat meter ini akan ditemui berbagai jenis pertokoan atau kedai. Bentuk jalan yang ada di Pulau Buluh adalah melingkar dan hanya membutuhkan 15 - 20 menit jalan kaki sudah dapat mengelilingi seluruh pulau ini.

Di Kecamatan ini tidak terdapat becak atau sepeda motor sebagaimana yang ada di Belakang Padang. Yang ada hanyalah motor pribadi, sepeda atau jalan kaki. Alat transportasi utama dari desa ke desa adalah perahu *pancung*.

Dari hasil survei yang dilakukan beberapa waktu lalu, jumlah toko maupun kedai yang ada di Pulau Buluh sebanyak 106 buah. Perinciannya sebagai berikut : Toko kelontong atau sembako sebanyak 25 buah, toko

makanan kecil/jajanan sebanyak 20 buah, kedai makan 11 buah, toko yang menjual air bersih empat buah, toko huburan empat buah, toko bahan bangunan dua buah, toko elektronik dua buah, toko sepatu/sandal/tas dua buah, toko mainan anakanak dua buah, toko penjual ikan dua buah, toko koperasi sekolah dua buah, kedai foto kopi dua buah dan toko-toko lainnya yang masing-masing satu buah.

Keberadaan pertokoan dan kedai tersebut sangat menghidupkan aktivitas perekonomian kecamatan karena mereka menjadi pusat perkulakan dari pedagangpedagang desa di sekitar Kecamatan Bulang tersebut. Para pedagang atau pengusaha di Pulau Buluh ini umumnya mengambil barang dari Batam atau untuk barang-barang tertentu mengambil dari Singapura.

Status kepemilikan pertokoan hampir sebagian besar dimiliki oleh etnis Tionghoa. Namun demikian masyarakat keturunan Tionghoa ini dapat beradaptasi dengan baik dalam kehidupan keseharian dengan masyarakat etnis lainnya sehingga kasus konflik antar etnis di Pulau Buluh tidak diketemukan.

Di bidang pendidikan keadaannya memang tidak semaju kawasan *hinterland* Belakang Padang. Sebagai Kecamatan baru, data secara detil tidak diketemukan. Namun melalui survei dapat diperoleh gambaran angka dunia pendidikan di Kecamatan Pulau Buluh. Data statistik tahun 2014 menyebutkan terdapat 18 Sekolah Negeri di Kecamatan Bulang mulai dari tingkat TK dan terdapat enam sekolah swasta.

Dengan minimnya jumlah sekolah yang tersedia, beban seorang guru dalam mengajar anak-anak didiknya akan sangat mempengaruhi daya tangkap murid dalam belajar. Untuk idealnya seorang guru mengajar murid 25 sampai 30 orang dalam satu kelas.

Jumlah penduduk yang tidak tamat SD di Kecamatan Buluh sebanyak 2.762 orang; tamat SD sebanyak 1.472 orang; tamat SLTP sebanyak 300 orang, dan tamat SLTA sebanyak 392 orang. Dilihat dari aspek pendidikan ini dapat dikatakan bahwa kualitas sumber daya manusia yang dimiliki Kecamatan ini amat rendah.

Meski dalam aspek kesehatan dari segi ketersediaan sarana dianggap sudah cukup memadai yakni dengan jumlah penduduk 11.484 jiwa (2014) terdapat

delapan Puskesmas dan tujuh Puskesmas Pembantu, satu Polindes, dua Posyandu dan tiga Poskesdes.

Namun Jumlah Tenaga kesehatan di Kecamatan Bulang masih dirasa kurang mengingat berdasarkan kepadatana yang mana rata-rata sarana kesehatan terdapat rata rata dua tenaga kesehatan.

Sebagaimana kawasan *hinterland* lainnya, jumlah penduduk yang ada sebagian besar mempunyai mata pencaharian sebagai nelayan khususnya nelayan tradisional.

Jenis nelayan tradisional yang ada di Kecamatan Buluh dapat dibedakan menjadi empat, yakni nelayan jaring, nelayan kelong, nelayan suluh udang dan nelayan bentor ketam. Tidak ditemukan nelayan selam, nelayan rawai ataupun nelayan pancing sebagaimana ditemukan di kawasan Belakang Padang.

Dari aspek ekonomi kehidupan nelayan di kawasan Kecamatan Bulang nampaknya jaiuh lebih baik ketimbang kehidupan nelayan di Kecamatan Belakang Padang. Hal ini diungkapkan oleh salah seorang nelayan yang diwawancarai.

la mengatakan “Sebenarnya kehidupan ekonomi nelayan di sini cukup lumayan, kecuali yang malas, karena kalau hanya mencari uang sebesar 150 ribu per hari itu dianggap sial (apes). Jika sedang untung dapat ikan dingkis misalnya khususnya pada menjelang hari raya Cina (imlek) dapat memperoleh uang ratusan ribu hingga jutaan. Jadi jika untuk makan saja tidak susah. Untuk nelayan suluh udang atau bentor ketam mereka jika beruntung dapat memperoleh penghasilan ratusan ribu rupiah. Jadi penghasilan itu dalam sehari kadang lebih besar dari kerja di perusahaan selama sebulan. Oleh karena itu banyak penduduk yang malas kerja di pabrik”.

Hal yang sangat berbeda dengan kehidupan nelayan khususnya di Pulau Belakang Padang yang kini setiap harinya mengeluh tidak lagi mudah mencari uang di laut sehingga sebagian dari mereka beralih profesi sebagai tukang ojek, tukang batu, atau kerja serabutan lainnya

yang tentu saja upahnya tidak mencukupi untuk kehidupan keseharian.

Gambaran kehidupan yang berbeda di Kecamatan Buluh juga dapat dilihat dari aspek lainnya. Di Kecamatan Buluh ini merupakan pusat penjualan ikan yang ditampung oleh toke yang kemudian dijual ke Singapura. Hasil tangkapan ikan dari nelayan Belakang Padang juga disetorkan ke toke yang ada di Kecamatan Buluh, kecuali beberapa toke dari Pulau Kasu yang langsung ke Singapura.

Jumlah toke yang cukup besar di Kecamatan Buluh ada belasan orang yang terdiri dari etnis Melayu dan etnis Tionghoa. Ketika survei dilakukan beberapa tahun lalu ada lima toke cukup besar yaitu Pak Karim, Pak Jamin, Pak Amoy, Pak Dien, dan Pak Salam. Mereka ini mempunyai banyak *pompong* yang mondar-mandir dari Sagulung ke Singapura.

KAWASAN HINTERLAND DALAM PERSPEKTIF KUALITATIF

Penelitian yang dilakukan dalam penulisan buku ini terdiri atas dasar tiga pendekatan, yakni pendekatan survei dengan instrumen kuisioner untuk masyarakat pada umumnya, pendekatan dokumentasi untuk mencari berbagai data yang relevan sebagai penunjang dan pendekatan lapangan dengan wawancara mendalam yang dilakukan oleh peneliti pada elit masyarakat di Kecamatan Belakang Padang dan Bulang.

Pada bagian ini pertama-tama akan dilaporkan mengenai hasil wawancara mendalam (*depth interview*) terhadap elit masyarakat di kedua kecamatan tersebut untuk melihat perspektif mereka terhadap ketertinggalan dan keterbelakangan yang dialami oleh daerahnya.

Dalam referensi sosiologis setidaknya terdapat tiga teoritik landasan yang umumnya dipergunakan sebagai pisau analisis dalam melihat ketertinggalan dan keterbelakangan suatu masyarakat.

Pertama, pendekatan yang mengacu pada teori *individual deficit*. Pendekatan ini menyatakan bahwa

ketertinggalan atau keterbelakangan lebih merupakan akibat karakteristik individual seperti rendahnya pendidikan, kemalasan, kesehatan dan sebagainya.

Kedua, pendekatan yang mengacu pada teori kultural atau *cultural deficit*. Pendekatan ini mengatakan bahwa ketertinggalan atau keterbelakangan masyarakat sangat berkaitan dengan faktor budaya dan lingkungan di mana masyarakat itu berada. Budaya malas, lingkungan kultural yang memboroskan ataupun budaya fatalistik lainnya dinilai sebagai *social fact* yang membuat masyarakat menjadi tertinggal atau terbelakang.

Ketiga, pendekatan yang mengacu pada teori struktural (*structural deficit*) yang menyatakan bahwa ketertinggalan atau keterbelakangan masyarakat lebih sebagai fungsi struktural ekonomi, sosial, politik yang tidak memberikan peluang bagi masyarakat untuk maju. Sistem politik, sosial ekonomi yang dibangun lebih banyak menguntungkan sebagian kelas menengah atas ketimbang kelas bawah.

Dengan kata lain masyarakat yang tertinggal dan terbelakang dihadapkan dengan blokade sistematis yang diciptakan oleh sistem tersebut. Dalam konteks ini peran

negara atau pemerintah dalam menciptakan sistem yang memblokade tersebut cukup besar.

Dengan menggunakan referensi politik tersebut dan didukung oleh data makro Batam, maka pada paparan awal ini akan dianalisis mengenai keterbelakangan dan ketertinggalan yang dialami oleh kawasan *hinterland* Batam.

MASYARAKAT HINTERLAND DAN KEDIGDAYAAN PASAR

Sebagaimana telah dijelaskan pada uraian sebelumnya, yang dikategorikan masyarakat *hinterland* Batam, adalah masyarakat yang tinggal di kawasan Kecamatan Belakang Padang dan Kecamatan Bulang. Sebagian besar penduduknya berasal dari suku Melayu, Jawa, Bugis, Minang, Sunda dan suku asli, yakni Suku Laut yang masih sangat miskin, tertinggal dan terbelakang.

Masyarakat di kawasan *hinterland* di dua kecamatan tersebut saat ini dapat dikategorikan sebagai *total monetized society*, masyarakat serba uang, yakni masyarakat di mana nyaris seluruh kebutuhan hidup warganya hanya dapat dipenuhi melalui transaksi pasar dengan media uang.

Bahkan standar uang yang berlaku bukanlah mata uang rupiah semata, tetapi juga mata uang asing (USD, ringgit dan Dolar Singapura). Hal ini tidak lain kawasan *hinterland* Batam tidak saja terletak dekat perbatasan Singapura dan Malaysia yang sangat strategis, tetapi juga

sebagai imbas dari industrialisasi yang terjadi di Pulau Batam.

Sistem ekonomi seperti ini telah berlangsung sejak puluhan tahun lalu, bahkan sebelum Batam ditetapkan sebagai pusat industri terkenal di Tanah Air sekitar tahun 1970-an.

Jauh sebelum itu masyarakat kawasan *hinterland* Batam sudah berhubungan dagang dengan Singapura dan Malaysia. Mereka menjual tangkapan ikannya ke Singapura atau Malaysia secara langsung dan kembalinya mereka membawa kebutuhan sehari-hari. Pola perekonomian seperti ini telah menggerus sendi-sendi ekonomi non uang. Pola tukar menukar barang dengan barang ataupun barang dengan jasa sudah tidak diketemukan lagi, sekalipun dalam suku laut yang masih sangat tertinggal dan terbelakang.

Kondisi sosial ekonomi seperti itu jika dilihat dari geografis kelurahan atau pedesaan secara luas dapat dikatakan bahwa masyarakat di kawasan *hinterland* Batam mencirikan masyarakat yang “mengurai” (*differentiated*) yang ditandai oleh adanya pemisahan antara kepentingan - kepentingan sosial dengan ekonomi yang nyata.

Secara umum hal ini berkaitan dengan kondisi ekonomi mereka yang bersumber dari berbagai mata pencarian yang semata - mata tidak hanya mampu bertumpu pada sektor tunggal seperti perikanan.

Potret masyarakat *hinterland* Batam adalah potret kehidupan nelayan karena sebenarnya sebagian besar masyarakat *hinterland* adalah masyarakat nelayan.

Masyarakat nelayan yang dalam kehidupan ekonominya harus berhadapan dengan kedigdayaan pasar dan perdagangan internasional. Mereka terperangkap dalam sirkulasi kapitalisme internasional yang sangat dahsyat.

Masyarakat nelayan *hinterland* tersebut saat ini telah berkubang bersama arus deras sistem ekonomi uang yang sedemikian ketatnya dan kapitalisme internasional yang berada di hadapan mereka (Batam dan Singapura), telah memaksa mereka untuk bersemuka dengan sistem ekonomi uang dan pasar internasional yang sifatnya monopoli dan oligopoli setiap harinya.

Seorang ibu rumah tangga nelayan, misalnya mengekspresikan kata-kata “*Hidup di Batam (Belakang Padang) ini semuanya serba uang.*”

*Beras beli, sayur beli, kayu beli, air tawar beli
.... Pokoknya semuanya mesti beli”.*

Ungkapan ini secara nyata menunjukkan bahwa mereka tidak berdaya menghadapi pasar yang seperti itu. Akibatnya masyarakat di kawasan *hinterland*, khususnya masyarakat nelayan miskin harus selalu menyediakan uang kontan guna memenuhi kepentingan pasar. Oleh karena itu dapat dimengerti jika dalam hasil survei banyak masyarakat nelayan miskin terjerat utang, khususnya pada *toke - toke*. Kehidupan masyarakat nelayan miskin yang banyak terlilit utang dapat dilihat pada hasil analisis statistik (survei) di bahasan berikutnya.

Sebagai tambahan secara umum dapat dikatakan bahwa: *Pertama*, sebagai nelayan, masyarakat di kawasan *hinterland* Batam tidak dapat mempertahankan hidup hanya dengan mengkonsumsi ikan yang mereka tangkap dari laut.

Pada tingkat yang nyata masyarakat nelayan di kawasan *hinterland* Batam memang selalu dihadapkan pada mekanisme pasar produksi secara langsung karena setiap harinya komoditas perikanan yang mereka

dapatkan dari laut itu harus dijual ke pasar secara langsung tanpa melalau proses yang dapat memposisikan mereka untuk melakukan kontrol terhadap pasar.

Hal ini berkaitan dengan kenyataan bahwa masyarakat kawasan *hinterland* yang sebagian besar merupakan masyarakat nelayan bergelut dengan jenis komoditas yang mempunyai resiko tinggi. Sementara itu mereka tidak menguasai teknologi yang mampu menunda hasil produksi yang berisiko itu untuk tidak langsung jatuh ke pasar. Akibatnya mereka tidak mampu mengontrol mekanisme pasar secara langsung, tetapi para pedaganglah (baca: *toke*) yang mengontrolnya. Ini yang membedakannya masyarakat pertanian untuk jenis komoditas tertentu yang berisiko rendah.

Kedua, warga nelayan di kawasan *hinterland* pada umumnya tidak mempunyai akses terhadap tanah pertanian, selain kesuburan tanah yang kurang memungkinkan untuk pertanian, kecuali hanya di beberapa daerah seperti Kasu, Pulau Bulan, Bulan Lintang dan Desa Setoko, juga kurang dikenalnya budaya bercocok tanam.

Ditambah lagi oleh faktor bahwa sebagian besar tanah tersebut ternyata sudah dimiliki oleh orang luar kawasan *hinterland*'.

Akibatnya mekanisme pasar seperti yang terjadi pada masyarakat pertanian tidak tersedia di lingkungan ini sehingga berbagai kepentingan rumah tangga harus dipenuhi oleh pasar secara langsung.

Dibandingkan masyarakat pertanian yang mendapatkan uang tunai sekali dalam setiap musim panen, masyarakat di kawasan *hinterland* yang umumnya nelayan dapat dikatakan mendapatkan uang tunai dalam putaran harian. Lepas dari masalah besar kecilnya, setiap harinya pasti ada uang yang mengalir masuk ke kantong mereka. Setiap hari pula pasti ada uang yang harus dikeluarkan dari kantong mereka untuk mendapatkan barang pemenuhan kebutuhan hidup yang disediakan pasar.

Kondisi ini telah memunculkan suatu sikap ekonomi yang khas pada masyarakat kawasan *hinterland* yang sebagian besar nelayan itu. Bahwa pada umumnya mereka sangat responsif terhadap pasar, bahkan pelaku pasar pun juga sangat ekspansif dalam mendistribusikan barangnya

ke masyarakat nelayan karena mereka memahami betul psiko-ekonomi nelayan.

Oleh karena itu apapun yang disediakan oleh pasar, dengan cepat mereka - sejauh kantong mengizinkan - akan segera mengadopsinya. Konsumerisme di kalangan masyarakat khas nelayan di kawasan *hinterland* Batam ini sebenarnya merupakan konsekuensi logis dari sistem ekonomi pasar seperti itu yang kemudian mempengaruhi psiko ekonomi mereka.

Persoalan ini pula yang memunculkan penafsiran stereotipe yang sangat mungkin kurang menyenangkan masyarakat nelayan. Secara umum masyarakat awam termasuk para pejabat pemerintah memberi jawaban yang kurang lebihnya sama satu dengan yang lain.

“Masyarakat di kawasan hinterland yang sebagian besar nelayan itu rata-rata tidak pandai. Mereka sangat boros dan mengidap mentalitas mumpung enak mumpung banyak, mumpung enak mumpung tersedia. Mereka tidak pernah berhemat, kalau dapat uang langsung dihabiskan saat itu juga”

(¹wawancara dengan beberapa elit masyarakat di Belakang Padang dan Bulang).²

Bahkan beberapa pejabat teras Pemko dengan menyitir pendapatnya Prof. Mubyarto mengatakan “*Masyarakat kawasan hinterland yang sebagian besar nelayan itu dapat diibaratkan seperti mengisi botol retak (pecah). Berapapun jumlah uang yang masuk hari itu pula akan habis*” (wawancara dengan salah satu elit pemerintah di Bappeko Batam).³

Sesungguhnya harus dipahami bahwa masyarakat di kawasan *hinterland* khususnya nelayan tidak dapat dikatakan tidak kenal prinsip hemat dan menabung.

¹ Dari hasil wawancara dengan banyak penduduk diinformasikan bahwa beberapa pulau sudah dimiliki oleh orang-orang Jakarta. Beberapa pulau yang dikunjungi peneliti ada penunggunya.

² Wawancara dilakukan saat peresmian HNSI Belakang Padang 1 Juli 2001 yang dihadiri perwakilan HNSI Batam, elit pemerintahan, LSM, dan wawancara di P. Buluh saat ada rapat di kecamatan mengenai Community Development di Kecamatan Bulang.

³ Komentar ini muncul dengan menyitir pernyataan Prof. Mubyarto ketika melakukan penelitian tentang potensi perekonomian di Batam.

Beberapa nelayan yang diwawancarai mengatakan bahwa nelayan bisa saja menabung, *toh ada contohnya.*

Pak Muhammad yang nelayan di Bulan Lintang misalnya, dengan prinsip hemat dan menabung akhirnya ia dapat menjadi nelayan jaring yang sebelumnya hanya sebagai nelayan suluh udang.

Ia mengatakan “dulu saya sebagai nelayan suluh udang. Namun sejak tahun 1980-an saya berpindah menjadi nelayan jaring. Saya hidup hemat dan saya kumpulkan uang dikit demi sedikit.

Kemudian saya membeli sampan lebih dulu baru kemudian setelah itu membeli mesin yang juga saya kumpulkan dari uang suluh udang.

Prosesnya memang lama dan harus dapat berhemat serta menabung bila ingin naik menjadi nelayan jaring, karena menjadi nelayan jaring membutuhkan dana yang cukup

⁴ Dana untuk menjadi nelayan jaring diperkirakan sebesar 15-20 juta yang dipergunakan untuk membeli sampan/perahu motor tempel, dan peralatan tangkap ikan (jaring dan sebagainya).

besar” (hasil wawancara dengan Pak Muhammad di Bulan Lintang).⁴

Dari fenomena tersebut, dapat dikatakan bahwa masyarakat nelayan mempunyai kesadaran untuk menabung. Apabila mereka mengeluarkan uang dalam jumlah besar hal itu terjadi karena hanya dengan mengeluarkan uanglah kelangsungan ekonomi mereka dapat terjaga. Satu hal yang lebih penting bila masyarakat nelayan yang membelanjakan seluruh uang yang ada di tangan, hal itu bukanlah karena mereka boros dan tidak rasional.

Akan tetapi lebih dikarenakan oleh kesadaran ekonomi bahwa mereka tidak mempunyai kemampuan untuk memprediksi dan mengontrol pasar hasil produksi mereka. Jadi pembelanjaan sejumlah uang terhadap barang kebutuhan merupakan reaksi rasional akan ketidakpastian pasar.

Artinya mereka lebih merasa untung untuk membelanjakan uangnya pada hari itu jika hari esok tidak pasti. Tentu saja hidup dalam sistem ekonomi yang seperti

itu bukanlah hal yang mudah, karena pasar bagaimanapun juga bukan hanya menyediakan keperluan hidup bagi masyarakat, tetapi pada saat yang sama juga mendikte masyarakat tentang apa yang mereka perlukan.

TEKANAN STRUKTUR EKONOMI INDUSTRIAL

Dengan uraian tersebut ingin dikatakan bahwa sistem dan struktur perekonomian yang berkembang di Batam tidak memberikan peluang bagi masyarakat *hinterland* untuk memasuki sistem pasar.

Yang terjadi adalah mereka didikte oleh pasar sehingga bentuk *economic participatory* tidak tercipta. Apalagi perkembangan perekonomian di Batam yang berbasis pada industri dan perdagangan serta berorientasi ekspor tidak dapat diakses oleh perekonomian dari kawasan *hinterland*.

Pasokan produk dan bahan baku untuk perkembangan ekonomi Batam tidak hanya dapat disetor dari kawasan *hinterland* tetapi justru dari luar negeri atau luar kawasan Batam. Dengan kata lain perkembangan perekonomian Batam dengan perkembangan perekonomian *hinterland* tidak ada *linkage* yang memungkinkan terbentuknya sistem perekonomian yang

terintegrasi antara ekonomi Batam dengan ekonomi kawasan *hinterland*.

Badan Pengusahaan (BP) Batam pernah mencatat persentase investasi dari pemerintah sebesar 20 persen, 47 persen dari swasta domestik, dan 33 persen investasi swasta asing. Dari nilai investasi yang ditanamkan pihak swasta, sektor industri menjadi primadona yang menyerap tak kurang 50 persen tenaga kerja. Menyusul kemudian investasi di bidang perdagangan dan jasa, perumahan, pariwisata, dan baru kemudian pertanian termasuk di dalamnya sub sektor perikanan termasuk perikanan laut.

Secara lengkap kegiatan perekonomian Batam yang mencerminkan struktur ekonomi di kawasan ini adalah 71,60 % merupakan industri pengolahan, 11,13 % perdagangan, hotel dan restoran, 4,90 % sektor keuangan, 3,47 % aktivitas ekonomi di bidang pengangkutan dan komunikasi, 3,28 % bangunan, 1,99 % bergerak di bidang jasa-jasa dan 1,62 % aktivitas ekonomi pertanian.

Memang dari data perikanan yang ada, nilai produksi perikanan tangkap di kawasan Belakang Padang cukup memadai hingga pernah mencapai 49 % dengan, namun harus diberi catatan bahwa bagian terbesar yang

menikmati hasil itu bukanlah nelayan tetapi para pedagang.

Kemudian perlu dikemukakan bahwa bahan baku yang dipergunakan untuk keperluan industri diimpor (85,33 persen dari impor Batam) dari negara Singapura, Jepang, AS, Perancis, Thailand dan sebagainya. Sedangkan sekitar 4000-an perusahaan yang terdapat di Batam, lebih dari seperempat bergerak di sektor industri berat, sedang seperti industri peralatan pengeboran lepas pantai, komponen elektronika, bahan kimia untuk farmasi dan migas, tekstil, pipa baja, alat-alat optik dan galangan kapal, sepatu, komputer dan komponennya.

Dengan demikian tidak mengherankan bila kegiatan perekonomian Batam yang didominasi sektor industri yang berorientasi ekspor (sekitar 70 persen) menjadikan Batam sebagai kota yang kaya, maju dan modern dengan nilai total kegiatan ekonominya mencapai puluhan triliun rupiah.

Sedangkan kawasan *hinterland* Batam dengan sistem dan struktur perekonomian seperti tersebut tidak dapat mengakses ke dalamnya. Dengan sistem dan struktur perekonomian yang demikian tidak ada pasokan

bahan baku yang bisa disediakan oleh masyarakat di kawasan *hinterland* sehingga tidak ada *linkage* ekonomi antara Batam sebagai kawasan industri *Free Trade Zone (FTZ)* dengan kawasan *hinterland* Batam.

Memang muncul argumen perkembangan perekonomian Batam yang demikian akan memberikan *economic multiplier effect* bagi kawasan *hinterland* Batam. Namun yang dipertanyakan masyarakat kawasan *hinterland* adalah bahwa efek ekonomi yang diperoleh tidaklah sebanding dengan apa yang dicapai di Batam.

Gugatan sekaligus keprihatinan yang dikemukakan Pak Musa Jantan, elit masyarakat dari Kampung Bugis yang menyatakan bahwa masyarakat Belakang Padang mengalami deskriminasi ekonomi, layak untuk dipikirkan. Demikian pula argumen bahwa kemajuan Batam akan memberikan peluang kesempatan kerja bagi masyarakat kawasan *hinterland* layak dipertanyakan.

Hasil wawancara yang pernah dilakukan dengan Ketua Perkumpulan Pengemudi Motor Sangkut (PPMS) Belakang Padang diperoleh gambaran bahwa peluang kerja masyarakat Belakang Padang untuk mengundi nasib di Batam sangat kecil.

la mengatakan “Pemerintah dan perusahaanperusahaan tidak mau menyiapkan suatu wadah untuk mengatasi pengangguran di Belakang Padang. Harusnya pembangunan di Batam memberikan fasilitas yang utama untuk masyarakat hinterland (Belakang Padang), memberikan kontribusi besarlah terhadap anak-anak di sini. Tapi mereka tidak. Anak-anak di sini bukannya tak mau kerja, mau dia kerja, cuma nak mau masuk membal, masuk tolak, masuk tolak. Mereka tamat SMA ambil kursus di Batam, kemudian cari kerja. Tapi hasilnya nol”.

Menurut pandangan Ketua PPMS Belakang Padang, untuk mengejar ketertinggalan dan keterbelakangan ini, pemerintah harus dapat mengalihkan sebagian investasinya yang terkonsentrasi di Batam untuk dipindahkan di kawasan *hinterland*.

la mengatakan *“Itu masih banyak pulau kosong yang dapat dipergunakan membangun pabrik. Pindahkan satu atau dua galangan kapal yang ada di Batam atau bangun perusahaan di pulau-pulau kosong itu sehingga anak-anak di sini bisa bekerja”*.

Memang dengan struktur dan sistem ekonomi seperti sekarang masyarakat *hinterland* tidak begitu susah mencari makan. *“Tapi kami tidak mau hidup hanya sekedar cari makan. Kami juga ingin anak-anak di pulau bisa sekolah dan maju”*. (wawancara dengan Pak Musa Jantan, Kampung Bugis Belakang Padang).

Hal senada dikemukakan oleh Hadi Susanto. Menurut Ketua Putra Batam *Hinterland* Belakang Padang ini, sudah saatnya Pemko dan BP Batam memperhatikan pembangunan di kawasan *hinterland*,

“Janganlah kami dibiarkan seolah-olah bukan bagian dari Batam. Bukalah akses transportasi dan perdagangan seperti Batam supaya

jangan ada diskriminasi pembangunan ekonomi”.

Gugatan sekaligus keprihatinan yang sama juga diungkapkan oleh elit masyarakat di Kecamatan Bulang. Bahkan di kawasan *hinterland* selatan ini kondisi keterputusan ekonomi sangat kentara. Masyarakat di Kecamatan Bulang tidak dapat mengakses hiruk pikuknya perekonomian Batam.

“Ditambah dengan kualitas sumber daya manusia yang rata-rata rendah, mereka hanya dapat menjadi tukang atau pekerja bangunan yang tentunya upahnya tidak besar. Mereka hanya bisa mengisi sektor-sektor ekonomi pinggiran di Batam. Dan mengalami kesulitan untuk memasuki sektor ekonomi modern di Batam “. (wawancara dengan Pak Abas di Pulau Buluh)

Hal inilah yang kemudian menjadi alasan sebagian penduduk di Kecamatan Bulang mengapa mereka tak mau

bekerja di Batam. “Upahnya kecil, lebih baik jadi nelayan, yang kalau sedang baik hasil sehari sama dengan kerja di Batam sebulan”, kata Pak Muhammad di Bulang Lintang.

Dari berbagai argumen yang diperoleh selama penelitian ini berlangsung, diperoleh kesan kuat bahwa ketertinggalan dan keterbelakangan masyarakat *hinterland* khususnya di bidang ekonomi tidak lepas dari adanya struktur ekonomi industrial yang sangat menekan di satu sisi dan di sisi lain akses masyarakat untuk memasuki struktur dan sistem ekonomi kapitalis yang modern sangat rendah.

Apabila masyarakat kawasan *hinterland* Batam sebagian besar (hampir 90 %) merupakan penduduk dari etnis Melayu, wajar apabila mereka kemudian mengatakan bahwa yang paling banyak menikmati perkembangan ekonomi Batam yang luar biasa bukanlah mereka tetapi masyarakat dari kelompok lain.

Sebuah gugatan yang apabila tidak dicarikan solusinya secara tepat maka kawasan *hinterland* dengan segala kompleksitasnya akan menjadi *destabilizing forces* bagi perkembangan Batam di masa depan.

KEBIJAKAN POLITIK : SEBUAH KEALFAAN

Perkembangan perekonomian di Batam yang dapat menjadi sedemikian penting dalam konfigurasi perkembangan ekonomi nasional jelas merupakan kebijakan politik yang diambil oleh pemerintah pusat.

Keputusan politik untuk mengembangkan Batam dituangkan dalam Keppres Nomor 74/1971 tentang Pengembangan Pembangunan Pulau Batam, Keppres Nomor 41/1973 tentang Daerah Industri Pulau Batam, SK Mendagri Nomor 43/1877 tentang Pengelolaan dan Penggunaan Tanah di Daerah Industri Pulau Batam.

Keppres Nomor 41/1978 tentang Penetapan Seluruh Daerah Industri Pulau Batam sebagai Wilayah *Bonded Warehouse* ; Keppres Nomor 56/1984 tentang Penambahan Wilayah Lingkungan Kerja Daerah Industri Pulau Batam dan Penetapannya sebagai Wilayah Usaha Kawasan Berikat ; Keppres Nomor 94 tentang Penyempurnaan atas Keputusan Presiden Nomor 41/1973 tentang Daerah Industri Pulau Batam.

Semua keputusan politik di atas menyebutkan bahwa hanya Pulau Batam yang dijadikan fokus pengembangan dan pembangunan industri dan tidak satupun yang menyebutkan kaitannya dengan pulau-pulau lain kecuali Pulau Rempang dan Galang yang diputuskan mellaui SK Ketua BPN No. 9-VIII-1993 dan Keppres Nomor 56/1964 tentang Penambahan Wilayah Lingkungan Kerja Daerah Industri Pulau Batam.

Dengan keputusan politik yang demikian pada akhirnya semua tahu bahwa Pulau Batam akhirnya menjadi pusat industri terkemuka dengan rata-rata pertumbuhan ekonominya mencapai tujuh persen. Namun di kawasan lain di sekitar Pulau Batam yang kini disebut kawasan *hinterland* tidak berkembang secepat Pulau Batam. Bahkan realitas yang muncul adalah ketertinggalan dan keterbelakangan kawasan *hinterland* yang kini tengah diupayakan percepatan pembangunannya agar kesenjangan yang terjadi tidak terlalu lebar.

Dalam wawancara mendalam yang pernah dilakukan dengan Ketua Otorita Batam Ismeth Abdullah, memang diakui bahwa kawasan *hinterland* dan Batam

yang kini sama-sama menjadi wilayah administratif kota otonom Batam terjadi kesenjangan yang cukup serius.

Perkembangan Batam secara ekonomik dinilai tidak mampu mengangkat ketertinggalan dan keterbelakangan yang dialami oleh “masyarakat pulau”, demikian masyarakat *hinterland* menyebut identitas komunitasnya dengan masyarakat di Pulau Batam.

“Memang pada awalnya yang dibangun pulau utama (Batam). Kalau kita lihat masterplannya tidak menyinggung pulau-pulau, tidak menyentuh hinterland. Pulau utama dulu, hinterland belum. Pembangunan di Batam diarahkan sebagai kawasan industri, kawasan alih kapal, kawasan perdagangan, kawasan pariwisata. Jadi tidak pernah memang menjalar sampai ke hinterland”.
Kata Ismeth Abdullah.

Apa yang dikatakan pimpinan OB (ketika penelitian ini dibuat tahun 2000) tersebut jelas merupakan derivasi dari keputusan politik pemerintah pusat yang dituangkan

dalam Keppres-Keppres di atas yang hanya menyebut pulau Batam, tidak pulau lainnya. Ia menambahkan tugas Pemko Batamlah untuk mengembangkan kawasan *hinterland* sedangkan pihak OB bersedia membantunya apabila sudah ada perencanaan yang matang tentang pengembangan kawasan *hinterland*.

“Jadi sebetulnya pada dasarnya memang belum pernah ada pemikiran menggerakkan, mengalihkan atau mendorong pertumbuhan ekonomi di hinterland. Artinya ada dalam tanda kutip “kealpaan”, tetapi “kealpaan” yang manusiawi karena pulau utama belum diurus, penduduknya belum tertata”.
(wawancara dengan Ketua OB, Ismeth Abdullah).

Dengan keputusan politik tersebut seakan-akan masyarakat kawasan *hinterland* Batam hanyalah sebagai “penonton” sebuah orkestra modernisasi dan industrialisasi.

“Pemerintah tak pernah berpikir untuk membangun kawasan hinterland. Dulu di kawasan hinterland akan dibangun pabrik busana, perusahaan garmen di Belakang Padang. Namun rencana itu batal karena keputusan politik pemerintah pusat tidak mengizinkan “ kata Mariono, Ketua PPMS Belakang Padang.

Hal senada juga dikatakan oleh seorang mantan Anggota DPRD Batam yang tinggal di Belakang Padang.

Ia mengatakan “Pemko sampai saat ini memang belum mempunyai desain untuk mengembangkan kawasan hinterland. Hal ini disebabkan oleh tarik ulur kepentingan antara Pemko Batam dengan OB. Pihak OB mengatakan bahwa pembangunan kawasan hinterland menjadi tugas Pemko, sedangkan Pemko Batam mengatakan bahwa itu merupakan tanggungjawab OB yang mestinya dulu juga memperhatikan kawasan

hinterland.” (wawancara dengan Amri Bedu).

Namun demikian pihak Pemko Batam mengatakan bahwa membandingkan kemajuan Batam dengan kawasan *hinterland* tidaklah tepat. Kalaupun saat ini kawasan *hinterland* masih tertinggal dan terbelakang itu bukan berarti pemerintah sengaja melupakan atau tidak memperhatikan sama sekali pembangunan di kawasan *hinterland*.

“Fokus perhatian pada masa lalu memang dipusatkan pada pembangunan Batam. Jadi wajar saja ada kepentingan”. Wakil Walikota Batam, Asman Abnur (Kompas, 29 September 2001).

Ke depan kawasan *hinterland* Barat khususnya Belakang Padang akan dijadikan sebagai ujung tombak penggerak ekonomi masyarakat pulau (*hinterland*). Hal ini sangat memungkinkan karena Belakang Padang melalui

RUU tentang Kawasan Perdagangan Bebas akan menjadi bagian tak terpisahkan dari Batam.

“Dulu Belakang Padang memang belum masuk wilayah bonded. Sehingga barangbarang apa saja yang keluar dari Batam harus dikenakan pajak. Jika nanti UU Kawasan Perdagangan Bebas jadi, tentu masalah harga kebutuhan pokok akan sama dengan Batam”
(Kompas, 29 September 2001).

Dari berbagai sumber informasi yang diberikan oleh para informan dapat dikatakan bahwa ketertinggalan dan keterbelakangan kawasan *hinterland* sangat berkaitan dengan masalah sistem politik di mana kebijakan politik yang dinilai tidak “peka” terhadap keberadaan masyarakat pulau. Harus dipahami bahwa kawasan *hinterland* bukanlah semata-mata Belakang Padang, masih ada Kasu, Terung, Pemping, Batu Lintang, Batu Legong dan sebagainya yang kesemuanya memerlukan *political will* yang jelas agar mereka tidak terus menerus menjadi penonton di negerinya sendiri.

Dengan berbagai wawancara yang dilakukan, keputusan politik untuk mengembangkan kawasan *hinterland* merupakan kebutuhan yang tak terelakkan. Keputusan politik untuk tidak melupakan kawasan *hinterland* sehingga jangan lagi ada “kealpaan” di masa mendatang merupakan *conditio sine qua non* bagi upaya mengejar ketertinggalan dan keterbelakangan yang dialami masyarakat pulau.

Menurut Ismeth Abdullah harus ada keputusan politik dari Pemko Batam untuk membentuk organisasi spesifik yang menangani pengembangan kawasan *hinterland*.

“Harus ada semacam badan pengembangan hinterland yang fungsinya menggerakkan investor untuk masuk ke kawasan ini. Secara teoritik pulau-pulau di kawasan hinterland berpeluang untuk dikembangkan, tapi kita tidak pernah punya adab khusus untuk mengembangkan pulau-pulau ini. Apakah ini kelemahan kita OB atau kelemahan Pemko, itu memang sudah terjadi.”

Dalam pengembangan kawasan *hinterland* untuk mengejar ketertinggalan dan keterbelakangannya, Osman yang dari LSM Belakang Padang mengatakan:

“Harus ada keberpihakan pemerintah dan harus ada desain yang menyeluruh untuk pembangunan kawasan hinterland. Saat ini yang terjadi antara Pemko dan OB saling menyalahkan. Itu tidak akan membantu masyarakat pulau. Mulai saat ini baik Pemko maupun OB harus berpaling ke kawasan hinterland sebab jika tidak maka masyarakat di sini akan tetap tertinggal dan terbelakang”.

Keputusan politik, keberpihakan pemerintah dan adanya desain pengembangan kawasan *hinterland* secara komprehensif nampaknya menjadi faktor penting jika kawasan *hinterland* ini akan dikembangkan di masa mendatang. Tanpa hal itu paradoks modernisasi dan industrialisasi di kawasan Batam akan tetap mewarnai perjalanan daerah ini.

BUDAYA BOROS DAN FATALISTIK MASYARAKAT

Ketertinggalan dan keterbelakangan kawasan *hinterland* Batam nampaknya bukan hanya “kealpaan” *by design* yang kemudian menciptakan sistem dan struktur ekonomi Batam yang terpisah antara kawasan *bonded* dan *hinterland* tetapi sepertinya juga berkaitan dengan faktor-faktor kultural serta psiko budaya masyarakat itu sendiri.

Pada dimensi struktural memang ketertinggalan dan keterbelakangan kawasan *hinterland* dan orang-orang pulau karena tidak ada peluang bagi mereka untuk mengakses sistem ekonomi yang kapitalis dengan corak industrialisasi yang berbasis pada *hi-tech*. Namun hal ini bukanlah sebagai faktor tunggal yang menyebabkan masyarakat pulau jauh tertinggal bila dibandingkan dengan masyarakat di kawasan *mainland*.

Dari berbagai wawancara dengan informan ditemukan bahwa ketertinggalan dan keterbelakangan masyarakat kawasan *hinterland* tidak semata-mata karena mereka tidak mampu mengakses dan masuk dalam

lingkaran dinamika ekonomi kapitas dan industrialisasi, tetapi juga disebabkan oleh faktor budaya, lingkungan dan juga faktor individual sebagaimana dijelaskan melalui pendekatan *cultural deficit* dan *individual deficit* yang telah diuraikan pada awal sub bagian ini.

Muh Bachri dari Pulau Buluh, misalnya mengatakan bahwa “*stereotipe masyarakat nelayan yang merupakan mayoritas masyarakat kawasan hinterland adalah malas, boros, konsumtif dan seringkali mabuk-mabukan*” memang tak bisa dihindarkan sekalipun semua perilaku dan tindakan mereka mempunyai rasionalitas tersendiri. Informan yang lulusan IAIN ini selanjutnya memberikan gambaran bahwa:

“Mereka seperti itu karena dari lahir dimanjakan oleh alam. Mereka gampang cari duit dan laut menyediakan sumber-sumber ekonomi yang cukup berlimpah. Dengan keluar malam sekali atau menyelam dan menjaring, mereka sudah dapat puluhan dan ratusan ribu. Hal ini berbeda dengan masyarakat petani yang harus bangun pagi kemudian kerja mencangkul hingga sore, itupun uang yang didapat harus menunggu masa panen. Sehingga tidak heran apabila gaya hidup petani menjadi sangat hemat karena begitu

susahnya cari uang, sedangkan masyarakat nelayan lebih banyak boros dan konsumtif karena mudah cari uang”.

Apa yang dikatakan oleh Bachri juga disampaikan oleh seorang Kepala Sekolah Dasar di Batu Lintang.

“Banyak masyarakat kurang menaruh minat pada pendidikan karena banyak anak yang ada sering didorong untuk membantu orang tua mencari ikan sehingga kualitas sumber daya manusianya rendah. Karenanya mereka sulit untuk bersaing mencari kerja atau mengejar ketertinggalan dengan masyarakat lainnya yang lebih maju”.

Padahal pendidikan merupakan faktor penting untuk mengejar ketertinggalan dan keterbelakangan. Di kawasan *hinterland* diperoleh data hampir 50 % penduduk mempunyai tingkat pendidikan yang sangat rendah dimana mereka tidak tamat SD. Fasilitas pendidikan tidak tersedia secara memadai di mana jumlah SMA hanya ada satu dan SMP hanya ada empat buah.

Ketidaktertarikan sebagian masyarakat kawasan pulau-pulau terhadap pendidikan dapat diikuti dari sebuah

cerita atau ilustrasi yang disampaikan oleh sekelompok guru SMP di Desa Kasu.

Para guru ini menceritakan

“Masyarakat kurang tertarik melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi karena malas, tidak ada jaminan setelah lulus dapat kerja yang lebih baik dan karena itu untuk apa sekolah. Kalau mau cari uang, nyelam saja. Bahkan ada beberapa anak sekolah SMP yang memperoleh bea siswa tetapi mereka tetap tidak mau sekolah”.

Para guru yang ditemui peneliti di dekat SMP Desa Kasu ini kemudian melanjutkan ceritanya.

“Suatu saat siswa yang memperoleh bea siswa tidak masuk sekolah dan ada di luar sekolah sambil merokok. Mereka kemudian didatangi guru dan ditegur kenapa tidak sekolah. Jawabnya sungguh di luar dugaan. Salah satu dari siswa itu menjawab, orang tuanya saja tidak marah ia tak masuk sekolah mengapa Bu Guru harus marah-marah. Bu guru tersebut kemudian lapor pada orang tua murid tersebut. Di luar dugaan pula bahwa orang tua murid itu bukannya terima kasih tetapi juga marah-marah”.

Masih menurut para guru, banyak siswa SMP yang sudah terlibat pacaran atau dengan mudahnya nonton film VCD porno. Satu di antara siswa yang menonton film itu kemudian bercerita kepada para guru dan baru saja melihat film orang-orang yang “*tak berselua*”. Kebetulan Penulis sempat bertemu dengan siswa tersebut yang tengah bermain di rumah gurunya. Penulis kemudian menanyakan apakah seperti itu sudah biasa dilakukan oleh anak-anak di pulau, jawaban yang didapat justru peneliti diantar pada sebuah rumah yang di sana tengah banyak anak-anak SD dan SMP melihat film orang-orang “*tak berselua*”.

Begitu sulitnya mendorong masyarakat untuk memberikan apresiasi terhadap dunia pendidikan, seorang guru SMP di Kasu sempat putus asa dan berdo’a “*semoga SMP ini ditutup saja*”. Suatu keputusan yang berlebih yang mestinya tidak perlu harus terucap.

Di sisi lain di daerah Batu Legong, Bulan Lintang, dan Setoko, yang kesemuanya masuk Kecamatan Bulang, gambaran dunia pendidikan juga tidak menggembirakan. Bahkan ada sebuah SD yang hanya mempunyai dua orang guru sehingga apabila satu guru tidak masuk maka sekolah

itu hanya dipegang oleh satu guru. Di kecamatan *hinterland* Selatan ini sebagian besar penduduk juga tidak tamat SD sehingga kualitas sumber daya manusianya juga sangat rendah.

Dengan kualitas sumber daya manusia yang rendah, menurut Pak Abas dari Pulau Buluh dikatakan “*Setiap kali masyarakat di sini (hinterland) mencari kerja di Batam, selalu kalah karena pendidikannya rendah*”. Namun ada yang lebih menarik bahwa di samping masyarakat enggan bekerja di Batam karena menyadari pendidikannya rendah, ternyata mereka malas kerja di Batam juga disebabkan oleh *way of life* yang berbeda.

Seorang informan di Buluh mengatakan bahwa masyarakat di kawasan pulau-pulau tidak ingin kerja di Batam karena di samping upahnya kecil, “*Mereka ingin bebas, tidak terikat, tidak suka diatur dan sekehendak mau kerja apa*”. Nilai-nilai kultural yang demikian telah membuat masyarakat di kawasan ini menjadi manusia yang merdeka yang benar-benar berlaku dan bertindak sesuai dengan kepentingannya. Dengan begitu apabila mereka memasuki sektor kehidupan modern yang sangat ketat tidak saja dalam menjalani ritme hidup, tetapi juga ketat

dalam berbagai hal lalu menjadi tidak adaptif, tidak responsif dan cenderung fatalistik.

Sikap tidak adaptif dan fatalistik ini menjadi kendala serius ketika virus perubahan modernisasi hendak diintrodusir. Hasil penelitian dan pelatihan yang dilakukan oleh Universitas Riau (2000) ketika hendak mengintrodusir sistem dari kultur yang memperoleh respon kurang menggembirakan menunjukkan betapa masyarakat masih fatalistik dan lebih suka menggantungkan kehidupannya dari ketersediaan sumber-sumber ekonomik di laut tanpa harus susah-susah melakukan perubahan ke arah marikultur.

Gambaran masyarakat yang boros dan fatalistik di kawasan *hinterland* Barat. “*Ya biasalah Mas, masyarakat pantai mana yang tidak berjudi, tidak boros dan tidak suka minum-minuman*”, kata Mariono, Ketua PPMS Belakang Padang. Hampir setiap malam ketika peneliti bergadang di pasar Belakang Padang, tentu dapat ditemukan banyak sekelompok masyarakat yang berada di berbagai sudut sedang melakukan judi atau minum-minum. Mereka menyebutnya sebagai kegiatan “*happy - happy*”.

Seorang Ketua Ormas Keagamaan (NU) ketika diwawancarai mengatakan bahwa *“Kebiasaan hidup boros masyarakat sulit untuk dihilangkan. Prinsip hidup cari sekarang habiskan sekarang memang masih kental mewarnai hidup mereka. Dari pihak kami (NU) dan ulama sudah terlalu sering untuk melakukan pembinaan bahkan mulut sampai berbuih, tetapi toh masih belum memberikan hasil yang memuaskan.”*

Menurut Pak Amri Bedu, tokoh setempat dari dan juga Pak Asiya yang mengelola galangan kapal di Belakang Padang, faktor budaya dan rendahnya kualitas sumber daya memang menjadi penyebab mengapa masyarakat kawasan *hinterland* jauh tertinggal dan terbelakang. Namun demikian adalah tugas pemerintah untuk dapat memberi stimulan agar mereka di masa depan dapat mengejar ketertinggalannya.

MEMBACA HASIL SURVEI

Pada bab ini dibahas hasil penelitian survei untuk memahami dan membuat analisis mengenai ketertinggalan atau keterbelakangan masyarakat Batam di kawasan *hinterland* baik dari perspektif *properties individual deficit*, kultural maupun *structural deficit*.

Apabila dalam bahasan sebelumnya ketertinggalan masyarakat Batam kawasan *hinterland* dilihat dan dijelaskan melalui perspektif elit masyarakat dengan pendekatan *indepth interview*, maka pada bab ini akan dilihat dan dijelaskan keterbelakangan masyarakat Batam kawasan *hinterland* dari perspektif masyarakat yang berada di tingkat *grass root*.

Dalam survei ini masyarakat yang menjadi sampel sebanyak 200 orang dengan *sampling error* sebesar 3,4 persen dan derajat kepercayaan 5 persen. Jumlah sampel dari Kecamatan Belakang Padang sebanyak 120 orang dan dari Kecamatan Bulang sebanyak 80 orang.

Sampel diambil secara random setelah terlebih dulu dilakukan pendekatan *purposif* untuk menentukan area dan karakter latar belakang responden.

Tentang Responden

Jumlah responden dari dua Kecamatan di kawasan *hinterland* Batam sebanyak 200 orang yang mencakup berbagai lapisan masyarakat bawah baik laki-laki maupun perempuan dengan berbagai latar belakang pendidikan, pekerjaan, usia dan suku bangsa.

Responden atas dasar jenis kelamin

1. Laki-laki	147	73%
2. Perempuan	53	27%
Jumlah	200	100%

Sumber : Data survei

Dari hasil pengambilan sampel secara acak dapat digambarkan tentang latar belakang responden yang secara teoritik akan dapat menjelaskan sikap dan perilaku individu dengan acuan perspektif *individual deficit*.

Responden sebanyak 200 orang terdiri dari 147 lakilaki dan 53 orang perempuan (lihat tabel).

Responden atas dasar pendidikan

1. Tidak tamat SD	98	49%
2. Tamat SD	52	26%
3. Tamat SLTP	28	14%
4. Tamat SLTA	13	6%
5. Tamat perguruan tinggi	9	5%
Jumlah	200	100%

Sumber : Data survei

Dari responden yang ada sebanyak 98 orang (49 %) tidak tamat SD; 52 orang (26 %) tamat SD; 28 orang (14 %) tamat SLTP; 13 orang (6,5 %) tamat SLTA dan 9 orang (4,5 %) tamat perguruan tinggi. (Lihat tabel 8).

Dari data sekunder yang diperoleh persoalan yang dihadapi masyarakat kawasan *hinterland* Batam memang kualitas sumber daya manusia yang rendah yang salah satunya dicerminkan dari latar belakang capaian pendidikan yang ditamatkan.

Data sekunder di Kecamatan Belakang Padang misalnya, dari jumlah penduduk sebanyak sekitar 18 ribu

jiwa, hampir 50 persennya tidak menamatkan pendidikan di tingkat dasar dan hanya sekitar 0,8 persen yang tamat perguruan tinggi. Konfigurasi itu jelas menunjukkan betapa faktor pendidikan memberikan sumbangan yang berarti bagi ketertinggalan dan keterbelakangan di masyarakat kawasan *hinterland* Batam.

Responden atas dasar pekerjaan

1. Nelayan	102	51%
2. Pedagang	34	17%
3. PNS	26	13%
4. Jasa (Sopir dll.)	18	9%
5. Buruh	8	4%
6. Serabutan	12	6%
Jumlah	200	100%

Sumber : Data survei

Sebagaimana karakteristik kawasan *hinterland* yang sebagian besar terdiri dari pulau-pulau dan dikelilingi laut, mata pencaharian yang utama adalah nelayan. Dari 200 responden sampel, sebanyak 102 orang mempunyai profesi nelayan; 34 orang pedagang; 26 orang sebagai pegawai negeri sipil termasuk guru, aparat birokrasi Kecamatan/ Desa; 18 orang bergerak di sektor jasa (tukang, pengemudi taksi, pengemudi pancung, dsb); 8 orang sebagai buruh; dan 12 orang kerja serabutan.

Usia responden yang menjadi sampel dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Responden Atas Dasar Usia

1. 16 th - 25 th	16	8%
2. 26 th - 35 th.	73	36%
3. 36 th - 45 th	68	34%
4. 46 th - 55 th.	37	19%
5. 56 th. Keatas	6	3%
Jumlah	200	100%

Sumber : Data Survei

Dilihat dari sisi etnisitas, responden terdiri dari suku Melayu sebanyak 104 orang; suku Jawa 63 orang; suku Minang 17 orang; suku Batak 8 orang; suku Bugis 3 orang dan 5 orang dari suku lainnya.

Dengan latar belakang atau identitas responden ini secara teoritik akan dapat dipahami ketertinggalan dan keterbelakangan masyarakat Batam di kawasan *hinterland*, baik dilihat dari sisi individual, kultural maupun struktural.

Responden atas dasar etnis

1. Melayu	104	52.0%
2. Jawa	63	31.5%
3. Minang	17	8.5%
4. Batak	8	4.0%
5. Bugis	3	1.5%
6. Lainnya	5	2.5%
Jumlah	200	100.0%

Sumber : Data survei

MASYARAKAT DAN LINGKUNGAN ALAM

Masyarakat Batam di kawasan *hinterland* atau masyarakat pulau, mereka menyebut demikian, sebagian besar hidup dan tinggal di pulau-pulau yang dikelilingi laut. Alat transportasi untuk melakukan mobilitas horizontal adalah *pancung* atau perahu dayung. Sebagian besar penduduk adalah nelayan.

Lingkungan alam membuat masyarakat Batam di kawasan *hinterland* sulit atau sangat terbatas dalam

Pendapat Responden atas kondisi Desa dan Transportasi.

1. Bertahan di Desa	105	52.5%
2. Pasrah	41	20.5%
3. Merantau	12	6.0%
4. Tidak tahu	42	21.0%
Jumlah	200	100.0%

Sumber : Data survei

melakukan mobilitas horizontal. Di samping harga transportasi mahal, juga ketersediaan alat transportasi tidak menentu.

Menghadapi kondisi lingkungan alam yang demikian, masyarakat *hinterland* pada akhirnya dihindangi

sikap pasrah dan tidak ingin pindah. Sebanyak 105 orang responden sampel menyatakan bahwa mereka ingin tetap bertahan dengan kondisi lingkungan yang demikian dan 41 orang menyatakan pasrah.

Sebanyak 44 orang mengaku tidak tahu harus berbuat apa dengan kondisi alam yang demikian dan hanya 12 orang yang mempunyai keinginan “keluar” dari isolasi desa (lingkungan alam yang dihadapinya).

Distribusi alasan responden yang tidak pernah berusaha mencari kerja di Batam

1. Di Desa sdh cukup	45	22.5%
2. Lebih baik jadi nelayan	95	47.5%
3. Kalah bersaing	15	7.5%
4. Tidak punya pendidikan	45	22.5%
Jumlah	200	100.0%

Sumber : Data survei

Dengan beban kehidupan yang cukup tinggi di kawasan Batam dan ketersediaan sumber alam (laut) yang masih ada, saat ini banyak masyarakat kawasan *hinterland* yang “miskin”.

Kepasrahan tetap menjadi nelayan merupakan pilihan hidup mereka. Di samping alam dirasakan masih memberikan sumber-sumber ekonomi untuk kehidupan mereka, latar belakang sumber daya manusia yang tidak berkualitas baik dan merasa kalah bersaing kalau harus keluar desa untuk mencari kerja, nampaknya menjadikan mereka harus memilih bertahan di pulau dengan kondisi lingkungan alam yang terfragmentasi.

Sebanyak 45 orang mengatakan tetap ingin bertahan di pulau dan bekerja di sana; 95 orang menyatakan tetap bertahan sebagai nelayan; 15 orang mengatakan kalah bersaing kalau harus bekerja di luar desa dan 45 orang merasa tidak mempunyai pendidikan yang cukup sebagai bekal untuk mencari kerja di luar desanya.

Kemauan untuk “keluar” dari isolasi desa di pulau-pulau juga ditunjukkan dengan pernyataan responden yang memberikan sikap pasrah dan kerja serabutan apabila sumber laut tidak lagi menjanjikan untuk kelangsungan hidup mereka.

Pendapat Responden apabila sumber ekonomi Desa laut tidak lagi mengijinkan

1. Alih profesi	126	63.0%
2. Kerja srabutan	44	22.0%
3. Mencari kerja di luar	12	6.0%
4. Pasrah	18	9.0%
Jumlah	200	100.0%

Sumber : Data survei

Sebanyak 126 orang menyatakan akan beralih profesi apabila lingkungan alam (laut) tidak lagi banyak menyediakan sumber ekonomi yang layak untuk menopang kehidupan kesehariannya; sebanyak 44 orang akan kerja serabutan; 18 orang merasa pasrah tidak tahu harus berbuat apa dan hanya 12 orang yang menyatakan akan mencari kerja di luar desa apabila memang laut tidak lagi menghidupinya.

MASYARAKAT DAN HIRUK PIKUK INDUSTRIALISASI

Sebagaimana hasil keputusan politik yang menjadikan Pulau Batam sebagai pusat pengembangan industri, perkembangan industrialisasi di Batam maju sangat pesat. Akibatnya Batam berkembang menjadi sentra ekonomi yang sangat kuat dan menjadi magnet bagi masyarakat untuk ikut mengundi nasib di Batam. Bagi idiom *ada gula ada semut*, maka Batam berubah menjadi semacam “gula” yang kemudian banyak menyedot “semut”.

Batam kemudian berkembang menjadi daerah tujuan pencari kerja utama selain Jakarta, baik yang datang dari daerah yang jauh dari Batam maupun daerah di sekitarnya termasuk masyarakat di kawasan *hinterland*.

Pengalaman responden mencari kerja di Batam

1. Sering	19	9.5%
2. Kadang-kadang	34	17.0%
3. Tidak pernah	147	73.5%
Jumlah	200	100.0%

Sumber : Data survei

Dari hasil survei, sebanyak 147 orang responden menyatakan tidak pernah mencari kerja di Batam; sebanyak 34 orang mengatakan kadang-kadang dan hanya 19 orang yang sering mencari kerja di Batam. Mereka yang mengatakan bahwa tidak pernah mencari kerja di Batam juga mencerminkan sikap mereka yang terdahulu, yakni lebih baik bertahan di desa dan menjadi nelayan.

Dari wawancara baik dengan elit masyarakat maupun hasil survei ada kesan kuat bahwa mencari kerja di Batam dengan hiruk pikuk industrialisasinya ternyata tidak mudah bagi masyarakat di kawasan *hinterland*.

Distribusi responden terhadap kesulitan mencari kerja di Batam.

1. Kesulitan	176	88.0%
2. Tidak sulit	13	6.5%
3. Tidak menjawab	11	5.5%
Jumlah	200	100.0%

Sumber : Data survei

Hasil survei memberikan gambaran bahwa sebanyak 176 orang mempunyai kesan bahwa mencari kerja di Batam akan mengalami kesulitan; 11 orang menyatakan tidak tahu dan hanya 13 orang yang mengatakan bahwa tidak sulit mencari kerja di Batam.

Menurut pandangan masyarakat, kesulitan untuk mencari kerja di Batam yang dialami oleh masyarakat kawasan *hinterland* berkaitan dengan masalah kualitas sumber daya manusia.

*Distribusi responden terhadap pemanfaatan peluang kerja
Di Batam*

1. Diskriminasi	12	6.0%
2. Syarat pendidikan	142	71.0%
3. Tidak ada informasi	18	9.0%
4. Tidak berminat	14	7.0%
5. Kalah bersaing	14	7.0%
Jumlah	200	100.0%

Sumber : Data survei

Sebanyak 142 orang responden mengatakan bahwa kesulitan masyarakat Batam kawasan *hinterland* dalam mencari kerja di Batam berkaitan dengan persyaratan pendidikan yang tidak terpenuhi; 18 responden menyatakan tak pernah ada informasi tentang peluang kerja di Batam ; 12 responden menyatakan ada diskriminasi dalam penerimaan pegawai atau karyawan antara masyarakat *hinterland* dengan pendatang lainnya; merasa kalah bersaing sebanyak 14 responden dan 14 orang menyatakan bahwa masyarakat tidak berminat mencari kerja di Batam .

Sementara itu mereka yang pernah berusaha dan kerja di Batam banyak yang tidak betah. Sebanyak 70 responden menyatakan bahwa kerja di Batam

penghasilannya kecil apabila dibandingkan dengan kerja di pulau sebagai nelayan.

Dalam wawancara mendalam dengan tokoh masyarakat di Kecamatan Bulang, misalnya, ketidakbetahan kerja di Batam adalah hasilnya tidak sebanding dengan penghasilan yang dapat diperoleh apabila mereka melaut. Contohnya, kerja di Batam di sektor industri paling tinggi gajinya mencapai Rp 3 jutaan.

Itupun harus masuk setiap hari mulai jam 7 pagi hingga jam 5 sore. Sebaliknya kalau kerja jadi nelayan, uang gaji sebesar itu kalau beruntung saat melaut dapat diperoleh hanya dalam waktu semalam.

Dalam perspektif teori “*rational choice*” apa yang dikemukakan oleh seorang elit masyarakat di Kecamatan Bulang barangkali dapat dipahami. Namun apabila kerja dinilai sebagai aktualisasi diri, simbol status dan sebagainya, maka persoalannya akan lain.

Apabila makin banyak masyarakat kawasan *hinterland* bekerja di Batam, maka makin banyak masyarakat yang akan bersinggungan dengan berbagai lapisan masyarakat lain. Secara teoritik proses interaksi

sosial itu akan dapat membuka cakrawala baru dan hal itu dapat menjadi pendorong bagi kemajuan masyarakat.

Berbeda dengan masyarakat yang tertutup dan hanya berputar di desanya, tidak pernah berinteraksi dengan dunia luar, maka hal itu akan membuat masyarakat tertinggal atau terbelakang. Realitas ini nampaknya dialami oleh masyarakat Batam di kawasan *hinterland*.

Distribusi responden yang pernah mencari kerja atau bekerja kemudian gagal atau keluar

1. Penghasilan kecil	70	35.0%
2. Kerja membosankan	12	6.0%
3. Tidak suka terikat	55	27.5%
4. Tdk sesuai keahlian	63	31.5%
Jumlah	200	100.0%

Sumber : Data survei

Berkaitan dengan kultur masyarakat kawasan *hinterland* yang kebanyakan suku bangsa Melayu, ketidakbetahan kerja di Batam sangat berkait dengan faktor kultural tersebut. Sebanyak 55 responden menjawab bahwa masyarakat kawasan *hinterland* yang

mayoritas suku Melayu mempunyai karakter yang tidak suka diperintah, tidak suka terikat; 12 orang menyatakan bahwa kerja di Batam membosankan dan 63 responden menyatakan bahwa ketidakbetahan kerja di Batam karena dirasa tidak sesuai dengan keahlian yang dimilikinya.

Sebagai akibat kesulitan dan ketidakbetahan masyarakat Batam kawasan *hinterland* dalam mengikuti arus hiruk pikuk industrialisasi di Batam, maka masyarakat di kawasan pulau - pulau ini merasa tidak menikmati hasil dari proses industrialisasi secara maksimal.

Distribusi pernyataan responden terhadap penikmatan hasil pembangunan Batam atas dasar suku bangsa

1. Melayu	6	3.0%
2. Jawa	14	7.0%
3. Batak	31	15.5%
4. Minang	39	19.5%
5. Bugis	1	0.5%
6. Cina	104	52.0%
7. Dan lain-lain	5	2.5%
Jumlah	200	100.0%

Sumber : Data survei

Sebanyak 104 responden menyatakan bahwa yang paling banyak menikmati hasil industrialisasi di Batam adalah dari suku bangsa Tionghoa.

Sementara 39 responden menyatakan urutan kedua yang menikmati hasil industrialisasi adalah dari suku Minang; disusul dengan 31 jawaban yang menyatakan suku Batak di urutan ketiga dan keempat dari suku Jawa; selebihnya dari suku-suku bangsa lain yang ada di Batam.

*Distribusi responden terhadap alasan penikmatan hasil
Pembangunan*

1. Lebih adaptif	43	21.5%
2. Pendidikan lebih baik	69	34.5%
3. Keuletan/Kegigihan	45	22.5%
4. Hemat & tidak boros	21	10.5%
5. Keria sama	22	11.0%
Jumlah	200	100.0%

Sumber : Data survei

Namun demikian, masyarakat di kawasan *hinterland* Batam tidak merasa iri atas keberhasilan mereka dalam menikmati proses industrialisasi di Batam. Sebanyak 69 responden menyatakan bahwa mereka layak menikmati hasil industrialisasi yang lebih karena mereka mempunyai pendidikan lebih baik; sebanyak 45 responden menyatakan

karena mereka gigih dan ulet; 43 responden menjawab bahwa mereka lebih adaptif ; 22 orang menyatakan bahwa mereka lebih mampu menjalin kerjasama dan 21 responden menjawab bahwa mereka yang dapat lebih menikmati hasil industrialisasi di Batam karena mempunyai sikap hidup hemat dan tidak boros.

Hasil survei ini juga menunjukkan bahwa masyarakat lokal (*indigeneus people*) seringkali “kalah bersaing” dengan masyarakat perantau (pendatang) karena di manapun nampaknya menjadi kelaziman bahwa masyarakat perantau untuk mempertahankan survivalnya harus mau bekerja keras, ulet, adaptif, dan mampu menjalin kerjasama dengan berbagai lapisan masyarakat sebagai salah satu strategi survival agar mereka dapat hidup baik di tempat baru.

Sedangkan masyarakat lokal umumnya merasa tidak perlu harus bekerja keras dan sebagainya karena anggapan bahwa mereka hidup “di rumahnya” sendiri sehingga mendorong berkembangnya sikap fatalistik.

Menurut masyarakat Batam di kawasan *hinterland*, mereka yang sering berusaha mencari kerja atau berusaha

di Batam sangat berkait dengan bidang kerja yang diminati masyarakat.

Dengan kata lain peluang kerja yang mampu menjadi daya tarik bagi penduduk untuk ikut mengadu nasib sangat bergantung pada sektor - sektor produksi yang ada di Batam.

*Penilaian responden atas bidang kerja yang diminati masyarakat
Hinterland selain nelayan di Batam (pada Industri / Pabrik)*

1. Diminati	163	81.5%
2. Tidak diminati	25	12.5%
3. Tidak tahu	12	6.0%
Jumlah	200	100.0%

Sumber : Data survei

Hasil survei memperlihatkan bahwa masyarakat di kawasan *hinterland* Batam sangat menaruh perhatian pada peluang kerja yang ada di sektor industri. Sebanyak 163 responden menjawab bahwa masyarakat sesungguhnya mempunyai minat pada sektor industri. Hanya 25 responden yang menyatakan bahwa mereka tidak berminat kerja di sektor industri; sementara 12 responden tidak memberikan jawaban.

Penilaian responden atas bidang kerja yang diminati masyarakat
Hinterland selain nelayan di Batam (pada Kantor Pemerintah)

1. Diminati	72	36.0%
2. Tidak diminati	113	56.5%
3. Tidak tahu	15	7.5%
Jumlah	200	100.0%

Sumber : Data survei

Hasil yang sangat menarik adalah bahwa masyarakat di kawasan *hinterland* ternyata tidak banyak menaruh minat untuk kerja di kantor pemerintah. Sebanyak 172 responden mengaku tidak tertarik kerja di kantor pemerintah, sementara yang mengatakan masyarakat berminat kerja di kantoran hanya sebanyak 72 orang, sedangkan 15 responden lainnya tidak menjawab.

Padahal sesuai dengan kultur mereka yang lebih diwarnai kultur “menak” atau “priyayi” dalam bahasa Jawa dan “amtemnaar” banyak masyarakat suku Melayu khususnya sangat berkait dengan kerja kantoran. Namun dalam survei ditemukan lain. Hal ini nampaknya berkaitan dengan “kebosanan” masyarakat untuk terus menerus melamar pekerjaan di kantor pemerintah tetapi tidak pernah dapat masuk.

“Nak mau masuk selalu membal karena penerimaan pegawai di kantor pemerintah sangat diskriminatif dan banyak KKN”, demikian dikatakan salah seorang elit masyarakat diwawancarai secara mendalam dalam penelitian ini.

Dengan kata lain sistem dan struktur birokrasi yang ada di Batam nampaknya tidak memberikan peluang bagi masyarakat Batam di kawasan *hinterland* ini.

Penilaian responden atas bidang kerja yang diminati masyarakat Hinterland selain nelayan di Batam (pada Galangan Kapal)

1. Diminati	45	22.5%
2. Tidak diminati	147	73.5%
3. Tidak tahu	8	4.0%
Jumlah	200	100.0%

Sumber : Data survei

Demikian pula masyarakat Batam di kawasan *hinterland* juga tidak berminat kerja di galangan kapal yang di Batam jumlahnya signifikan. Sebanyak 147 responden menyatakan tidak berminat kerja di galangan kapal; 45 orang menyatakan berminat dan 8 orang mengaku tidak tahu.

Dari hasil wawancara mendalam dengan pengelola dan manajer Galangan Kapal yang ada di Kecamatan Belakang Padang, Ah Siyang, diperoleh penjelasan bahwa tidak berminatnya masyarakat untuk kerja di galangan kapal karena selain gajinya kecil, kerjanya cukup berat, tetapi juga karena umumnya mereka sering bosan.

“Sulit untuk menarik kerja masyarakat di sekitar sini (Belakang Padang) untuk kerja di galangan kapal. Mereka umumnya cepat bosan dan tidak tahan dengan sistem kerja yang terstruktur”.

Ah Siyang juga memberikan penjelasan apabila kebanyakan masyarakat suku Melayu sulit diperintah, ingin bebas dan tidak suka terikat. *“Padahal kerja di galangan kapal harus disiplin dan mau kerja keras,”* kata Siyang.

Penilaian responden atas bidang kerja yang diminati masyarakat Hinterland selain nelayan di Batam (pada Pekerjaan Serabutan)

1. Diminati	2	1.0%
2. Tidak diminati	183	91.5%
3. Tidak tahu	15	7.5%
Jumlah	200	100.0%

Sumber : Data survei

Penilaian responden atas bidang kerja yang diminati masyarakat Hinterland selain nelayan di Batam (pada Hotel/ Restoran)

1. Diminati	12	6.0%
2. Tidak diminati	164	82.0%
3. Tidak tahu	24	12.0%
Jumlah	200	100.0%

Sumber : Data survei

Penilaian responden atas bidang kerja yang diminati masyarakat Hinterland selain nelayan di Batam (pada Transportasi/ Komunikasi)

1. Diminati	22	11.0%
2. Tidak diminati	130	65.0%
3. Tidak tahu	48	24.0%
Jumlah	200	100.0%

Sumber : Data survei

Bidang kerja lain yang tidak diminati masyarakat di kawasan *hinterland* adalah sektor perhotelan/restoran,

sektor transportasi dan komunikasi, sektor informal atau kerja serabutan lainnya (lihat tabel).

*Penilaian responden atas ketertinggalan masyarakat hinterland
karena Pendidikan rendah*

1. Setuiu	135	67.5%
2. Tidak setuju	63	31.5%
3. Tidak iawab	2	1.0%
Jumlah	200	100.0%

Sumber : Data survei

Apa yang diperoleh dari hasil survei ini setidaknya mencerminkan sikap dan perilaku masyarakat kawasan *hinterland* dalam melihat peluang kerja yang ditawarkan di Batam di samping adanya kendala-kendala struktural dan kultural yang dihadapi mereka.

APA KATA MASYARAKAT ?

Kawasan *hinterland* Batam yang terdiri dari dua Kecamatan dan berpulau - pulau memang sangat kontras apabila dibandingkan dengan Pulau Batam yang sangat maju dan modern dengan perkembangan perekonomian yang sangat menakjubkan.

Hidup di kawasan *hinterland* adalah hidup dengan segala keterbatasan, ketertinggalan dan keterbelakangan yang tentu sangat berbeda jauh dengan kehidupan di Batam.

Jika hidup di Batam tersedia jalan-jalan aspal *hotmix* yang sangat halus, tidak demikian hidup di pulau-pulau. Jangankan jalan aspal *hotmix*, jalan beraspal biasa pun sulit ditemukan. Umumnya jalan-jalan yang ada di pulau-pulau kecil dan hanya disemen.

Demikian pula jika hidup di Batam dapat menaiki mobil-mobil mewah yang di wilayah Indonesia lain jarang ditemukan, tidaklah demikian hidup di kawasan *hinterland*. Jangankan mobil, sepeda motor atau becak pun sangat minim dan lebih banyak terdapat di Belakang Padang.

Selebihnya untuk mengelilingi wilayah desa di daratan umumnya hanya dengan jalan kaki.

Yang jelas paradoks kehidupan di Batam dengan kawasan *hinterland* dapat dengan mudah disaksikan. Ketertinggalan dan keterbelakangan kehidupan di kawasan *hinterland* Batam hampir terjadi di berbagai dimensi, tidak saja dimensi fisik tetapi juga dimensi non fisik seperti cara berfikir, kebudayaan, perilaku dan sebagainya.

Dalam perspektif teoritik, ketertinggalan atau keterbelakangan mempunyai akar yang bersumber dari dimensi individual (*individual deficit*) seperti pendidikan, etnisitas, kesehatan dan sebagainya; dimensi kultural (*cultural deficit*) seperti adat istiadat yang membelenggu kreativitas, budaya malas dan sebagainya; serta dimensi struktural (*structural deficit*) seperti sistem dan kebijakan ekonomi, politik, sosial yang tidak memberikan ruang partisipatoris bagi kelompok miskin atau tertinggal.

Hasil survei memberikan penjelasan bagaimana ketertinggalan dan keterbelakangan yang dialami masyarakat pulau-pulau di Batam dilihat dari perspektif mereka. Dengan kata lain apa kata mereka tentang sebab

sebab yang menjadikan masyarakat pulau-pulau tidak dapat maju seperti yang terjadi pada masyarakat di kawasan *bonded* di Batam.

Penilaian responden atas ketertinggalan masyarakat hinterland karena sifat malas.

1. Setuju	83	42%
2. Tidak setuju	112	55%
3. Tidak jawab	5	3%
Jumlah	200	100.0%

Sumber : Data survei

Masyarakat mengatakan bahwa ketertinggalan atau keterbelakangan yang dialami masyarakat pulau disebabkan oleh banyak faktor. Sebanyak 135 orang mengatakan bahwa ketertinggalan dan keterbelakangan masyarakat *hinterland* karena faktor pendidikan yang rendah. Mereka yang menjawab tidak setuju pendidikan sebagai faktor penyebab ketertinggalan dan keterbelakangan sebanyak 63 orang dan yang tidak menjawab 2 orang .

Penilaian responden atas ketertinggalan masyarakat hinterland
karena dimanjakan dalam

1. Setuju	39	19.5%
2. Tidak setuju	144	72.0%
3. Tidak jawab	17	8.5%
Jumlah	200	100.0%

Sumber: Data survei

Asumsi orang luar yang selama ini mengatakan bahwa masyarakat pulau adalah masyarakat yang malasmalas dinilai mereka tidak pas. Sebanyak 112 orang yang menyatakan ketidaksetujuannya apabila mereka dikatakan sebagai komunitas yang memiliki sifat malas.

Mereka yang setuju apabila dikatakan masyarakat *hinterland* memiliki sifat malas sebanyak 83 orang sedangkan lima orang lainnya tidak menjawab.

Namun demikian dalam wawancara mendalam dan hasil pengamatan terllibat banyak diperoleh penjelasan bahwa masyarakat tempatan cepat puas dan ketika memperoleh hasil yang dinilai cukup maka mereka tidak akan berusaha lagi dan menghabiskan peghasilan yang

saat itu diperolehnya. Sebagai contoh, seorang nelayan di Belakang Padang menyatakan:

“Semalam cari ikan, dapat tiga juta dan cukup untuk keperluan hidup dua tiga hari. Maka hari itu ia dipastikan tidak akan cari ikan, tetapi nunggu uangnya habis”.

Dengan kata lain kehidupannya dapat diibaratkan seperti pepatah *kais pagi makan pagi, kais petang makan petang*. Tetapi itu dilakukan bukan karena kemiskinan dan ketidakberdayaan namun lebih karena malas saja.

Lebih dari itu mereka juga membantah bahwa ketertinggalan atau keterbelakangan mereka karena selama ini dimanjakan alam. Sebanyak 144 orang menyatakan ketidaksetujuannya dengan asumsi itu.

Distribusi responden atas dasar penilaian terhadap kebiasaan dan perilaku masyarakat Hinterland (Kebiasaan Boros)

1. Setuju	75	38%
2. Tidak setuju	96	47%
3. Tidak jawab	29	15%
Jumlah	200	100%

Sumber : Data survei

*Penilaian responden atas ketertinggalan masyarakat hinterland
karena kebiasaan hidup*

1. Setuju	127	63.5%
2. Tidak setuju	45	22.5%
3. Tidak jawab	28	14.0%
Jumlah	200	100.0%

Sumber : Data survei

Sebaliknya mereka mengakui bahwa ketertinggalan atau keterbelakangan masyarakat pulau lebih dikarenakan oleh faktor kebiasaan hidup (suka judi, pemboros, tidak punya kemauan menabung, dan sebagainya).

Sebanyak 127 responden memberikan persetujuan bahwa ketertinggalan atau keterbelakangan yang dialami mereka karena faktor kebiasaan hidup ini. Sebanyak 45 orang menolak anggapan ini dan 28 orang menjawab tidak tahu.

Kebiasaan untuk memboroskan uang dalam tradisi “joget” juga dinilai sebagai penghambat kemajuan. Sekalipun tradisi “joget” sepintas tidak memberikan penjelasan yang rasional apabila dikaitkan dengan masalah ketertinggalan masyarakat, namun perlu dipahami bahwa apabila tradisi ini dilakukan secara masif maka secara

ekonomik absorpsi dana masyarakat yang keluar pulau cukup besar.

Seseorang yang ingin tampil dalam “joget” untuk satu giliran dikenai biaya Rp 20.000,- dengan diiringi sebanyak 10 lagu. Dalam satu kali giliran secara bersamaan tampil 8 sampai 10 pasang penari. Padahal untuk untuk semalam dapat dilakukan sekitar tujuh giliran sehingga dana yang terserap untuk kepentingan “joget” per malam dapat mencapai jutaan rupiah.

Tanggapan masyarakat terhadap hiburan “joget”

1. Untuk hiburan	45	22.5%
2. Sudah kebiasaan	44	22.0%
3. Tak ada sanksi hk.	82	41.0%
4. Ikut-ikutan	29	14.5%
Jumlah	200	100.0%

Sumber : Data survei

Hasil survei memberikan gambaran bahwa tradisi “joget” ini dinilai sebagai suatu kebiasaan yang sudah turun temurun 22%, di samping karena tidak adanya sanksi hukum 41 %, sekadar sebagai “hiburan” 22,5% dan ikut-ikutan 14,5 %.

Penilaian Responden terhadap “Joget” memberatkan

1. Setuju	165	82.5%
2. Tidak setuju	7	3.5%
3. Tidak menjawab	28	14.0%
Jumlah	200	100.0%

Sumber : Data survei

Sekalipun tradisi joget dianggap memberatkan ekonomi rumah tangga, toh mereka menganggap bahwa joget sulit dihilangkan, di samping karena sebagai media hiburan, juga institusi sosial yang ada tidak pernah melarang.

Sebanyak 88 orang menyatakan bahwa lembaga adat atau desa tidak pernah melakukan pelarangan terhadap judi, joget atau minum-minum. Sebanyak 60 orang menjawab bahwa institusi adat/desa sudah seringkali melarang namun karena tidak ada penegakan hukum yang tegas maka fenomena sosial yang patologis itu tetap berlangsung.

Demikian pula kebiasaan berjudi yang hampir di setiap sudut desa sampai kecamatan dapat ditemui,

absorpsi dana masyarakat yang ke luar khususnya ke Singapura tiap bulannya dapat mencapai miliaran rupiah. Namun semua itu dianggap oleh masyarakat sebagai suatu “hiburan” dan bukannya pemborosan.

Responden Lembaga Adat/Desa untuk memerangi kebiasaan judi, minum-minum, “joget”.

1. Tidak pernah	88	44.0%
2. Sering	60	30.0%
3. Jarang	52	26.0%
Jumlah	200	100.0%

Sumber : Data survei

Penilaian responden atas ketertinggalan masyarakat hinterland karena pasrah

1. Setuju	100	50.0%
2. Tidak setuju	65	32.5%
3. Tidak jawab	35	17.5%
Jumlah	200	100.0%

Sumber : Data survei

Menurut mereka masyarakat di kawasan *hinterland* Batam yang tertinggal dan terbelakang juga berkaitan dengan sikap hidup yang fatalistis, yakni pasrah pada nasib

dan keadaan. Sebanyak 100 responden menyatakan bahwa sifat dan sikap pasrah pada nasib membuat mereka menjadi tidak maju. Sedangkan mereka yang tidak memberikan persetujuan sebanyak 65 orang dan tidak menjawab sebanyak 35 orang.

Sikap fatalistik yang menjangkiti masyarakat pulau tidak dapat dilepaskan dari kondisi alam dan lingkungan yang memang membuat mereka tak berdaya.

Masyarakat benar-benar *powerless*. Di tengah kondisi alam yang sangat terbatas berbagai akses ekonomi, politik dan sosial tidak dapat dimilikinya. Akibatnya masyarakat pulau menjadi terisolasi dan teralienasi.

Tidak adil apabila ketertinggalan dan keterbelakangan masyarakat pulau hanya ditimpakan pada faktor budaya yang melingkupi mereka dan sifat individual masyarakat. Menurut masyarakat pulau, mereka tertinggal dan terbelakang bukan karena semata-mata malas, boros dan sebagainya, tetapi pemerintah tidak pernah memberikan kesempatan bagi mereka untuk maju.

*Penilaian responden atas ketertinggalan masyarakat hinterland
karena kurang kesempatan*

1. Setuju	157	78.5%
2. Tidak setuju	29	14.5%
3. Tidak jawab	14	7.0%
Jumlah	200	100.0%

Sumber : Data survei

Sebanyak 157 responden setuju apabila ketertinggalan dan keterbelakangan masyarakat pula diakibatkan oleh tidak adanya kesempatan untuk maju. Sebanyak 29 orang menyatakan tidak setuju dan 14 orang menjawab tidak tahu. Ini artinya sistem dan struktur ekonomi, politik dan sosial yang tercipta tidak pernah memberikan peluang bagi masyarakat pulau untuk terlibat dalam proses ke arah kemajuan.

Hal ini juga dapat dilihat dari penilaian masyarakat yang mengatakan bahwa sampai saat ini Pemerintah Kota Batam dinilai tidak mempunyai desain kebijakan yang komprehensif dan cepat dalam mengembangkan kawasan *hinterland*.

Penilaian responden terhadap kebijakan Pemko Batam untuk mengembangkan kawasan hinterland.

1. Sudah	51	25.5%
2. Belum	87	43.5%
3. Tidak menjawab	62	31.0%
Jumlah	200	100.0%

Sumber : Data survei

Sebanyak 87 orang menyatakan bahwa Pemerintah Kota Batam dinilai belum membuat rancangan untuk pembangunan kawasan hinterland; sebanyak 62 orang menyatakan tidak tahu dan 51 orang yang menganggap bahwa desain pengembangan kawasan *hinterland* telah dibuat oleh pemerintah Kota Batam.

Pengetahuan tentang Polda dan Renstra Kota Batam

1. Mengetahui	47	23.5%
2. Tidak mengetahui	65	32.5%
3. Tidak tahu	88	44.0%
Jumlah	200	100.0%

Sumber: Data Survei

Demikian pula masyarakat pulau menilai bahwa Pemerintah Kota Batam belum memberikan sosialisasi

akan Rencana Strategis (Renstra) Kota Batam untuk membangun kawasan pulau-pulau. Sebanyak 88 orang menyatakan tidak tahu adanya Rencana Strategis Pemko Batam; sebanyak 65 orang menyatakan memberikan jawaban dan hanya 47 orang yang merasa mengetahui adanya Renstra Kota Batam.

Dengan ketidaktahuan masyarakat terhadap rencana strategis maupun kebijakan pembangunan yang akan dilaksanakan untuk pengembangan kawasan *hinterland*, maka upaya untuk melibatkan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengembangan wilayah akan banyak mengalami kendala.

Karena sesungguhnya proses pembangunan yang manajemennya bersifat *hit and run* sebagaimana diterapkan Pemerintah Kota Batam hingga saat ini tidak akan membuat masyarakat memiliki *political efficacy* dan ikut merasa bertanggungjawab atas kemajuan wilayahnya.

Ketidaktahuan masyarakat akan adanya Renstra dan desain pengembangan wilayah *hinterland* Batam secara komprehensif juga akan menyulitkan bagi upaya *social engineering* untuk mempersiapkan masyarakat terlibat dan bertanggungjawab bagi pengembangan wilayah.

HARAPAN MASYARAKAT TERHADAP PEMERINTAH

Pengembangan wilayah dan pemberdayaan masyarakat Batam di kawasan *hinterland* menurut perspektif masyarakat harus dilakukan oleh pemerintah Kota Batam.

Menurut mereka sudah menjadi tugas pemerintah untuk dapat mengembangkan wilayah *hinterland* dan memberdayakan masyarakatnya agar dapat maju seperti yang terjadi pada masyarakat di kawasan *mainland* dan tidak lagi tertinggal atau terbelakang.

Oleh karena itu, menurut masyarakat pulau, sejumlah agenda kebijakan yang perlu dilakukan dan itu merupakan harapan masyarakat di kawasan *hinterland* agar dapat dilakukan pemerintah dan merupakan kebutuhan masyarakat meliputi beberapa hal.

Masyarakat *hinterland* sangat berharap apabila pemerintah dapat bertindak sebagai fasilitator untuk mengembangkan kebijakan yang menyangkut kebutuhan alih profesi.

Persetujuan responden atas kebijakan yang perlu dilakukan
Pemko Batam dengan melakukan pelatihan profesi dan
alih profesi

1. Setuju	183	91.5%
2. Tidak setuju	0	0.0%
3. Tidak menjawab	17	8.5%
Jumlah	200	100.0%

Sumber : Data survei

Sebanyak 183 orang setuju apabila pemerintah memberikan pendidikan dan latihan agar terjadi transformasi tenaga kerja sehingga mereka dapat ikut terlibat dalam hiruk pikuk industrialisasi yang ada di Batam.

Pemerintah kota Batam juga dituntut untuk dapat mengembangkan transportasi modern antar desa. Sebanyak 194 responden memberikan persetujuannya apabila di kemudian hari masalah transportasi antar desa ini ditingkatkan

Sampai saat ini transportasi antar desa di kawasan *hinterland* yang mempunyai tiga kelurahan dan delapan ini hanya dilayani dengan menggunakan *Pompong*, sejenis perahu kayu tradisional dengan menggunakan mesin diesel.

Kapasitas angkut penumpang Pompong bisa mencapai 20 orang lebih dan kecepatannya lambat. Berbeda dengan perahu Feri yang modern dan berkecepatan tinggi.

*Persetujuan responden atas kebijakan yang perlu dilakukan
Pemko Batam dalam mengembangkan sistim transportasi
modern antar Desa*

1. Setuju	194	97.0%
2. Tidak setuju	0	0.0%
3. Tidak menjawab	6	3.0%
Jumlah	200	100.0%

Sumber : Data survei

Pompong yang melayani rute antar desa ini tiap harinya hanya berjalan sekali sehingga mobilitas penduduk menjadi sangat terbatas.

Persetujuan responden atas kebijakan yang perlu dilakukan Pemko Batam dengan membuka transportasi antar Desa lebih dari satu kali.

1. Setuju	195	97.5%
2. Tidak setuju	0	0.0%
3. Tidak menjawab	5	2.5%
Jumlah	200	100.0%

Sumber : Data survei

Wajar apabila masyarakat berharap agar pemerintah dapat membuka intensitas angkutan dapat lebih dari satu kali tiap harinya. Sebanyak 195 responden menyatakan agar pemerintah dapat mengusahakan terbukanya isolasi yang dialami desa - desa dengan menambah intensitas angkutan antar desa dengan menggunakan alat transportasi yang lebih modern. Selain *Pompong* sebagai alat transportasi utama, juga tersedia *Pancung* tetapi sewanya untuk satu desa ke desa lain cukup mahal. Daya angkut *Pancung* ini sebanyak 8 orang. Alat transportasi yang menggunakan mesin tempel dengan kekuatan antara 20-80 PK ini memang cukup cepat jalannya, namun untuk kepentingan mobilitas yang cukup tinggi harus dibayar dengan ongkos yang sangat mahal.

Menurut pandangan masyarakat, apabila pemerintah mampu membuka isolasi desa dengan membangun sistem transportasi yang memadai bagi masyarakat di kawasan *hinterland*, maka masyarakat akan lebih mempunyai peluang untuk melakukan mobilitas horizontal yang lebih banyak sehingga akan banyak berinteraksi dengan berbagai masyarakat luas yang pada akhirnya dapat mempengaruhi wawasan dan cara berfikirnya untuk dapat lebih maju.

Persetujuan responden atas kebijakan yang perlu dilakukan Pemko Batam dengan mengembangkan industri dikawasan Hinterland

1. Setuju	181	90.5%
2. Tidak setuju	0	0.0%
3. Tidak menjawab	19	9.5%
Jumlah	200	100.0%

Sumber : Data survei

Di samping itu masyarakat di kawasan pulau-pulau juga berharap agar untuk mengejar ketertinggalan dan keterbelakangan mereka pemerintah perlu mengembangkan industrialisasi di kawasan *hinterland*. Sebanyak 181 responden menyatakan bahwa pengembangan industrialisasi di kawasan *hinterland* akan sangat membantu masyarakat untuk lebih maju.

Persetujuan responden atas kebijakan yang perlu dilakukan
Pemko Batam dengan mengembangkan prasarana
Pendidikan.

1. Setuju	198	99.0%
2. Tidak setuju	0	0.0%
3. Tidak menjawab	2	1.0%
Jumlah	200	100.0%

Sumber: Data survei

Yang paling penting, menurut perspektif masyarakat kawasan *hinterland*, untuk mengejar ketertinggalan dan keterbelakangan pemerintah sangat perlu mengembangkan dan membangun prasarana dan sarana pendidikan termasuk penyediaan tenaga guru yang cukup dan berkualitas.

Sebanyak 198 responden dari 200 sampel menyatakan bahwa mereka percaya pendidikan akan memegang peran penting dalam mensejajarkan dengan masyarakat Batam di kawasan *bonded*.

Namun demikian masyarakat tidak setuju apabila model pendidikan yang dikembangkan adalah pendidikan jarak jauh. Sebanyak 187 responden menolak apabila untuk mengatasi ketertinggalan mereka diberlakukan model pendidikan jarak jauh.

Persetujuan responden atas kebijakan yang perlu dilakukan Pemko Batam dengan mengembangkan pendidikan jarak jauh

1. Setuju	2	1.0%
2. Tidak setuju	187	93.5%
3. Tidak menjawab	11	5.5%
Jumlah	200	100.0%

Sumber : Data survei

Mengingat bahwa kualitas sumber daya manusia di kawasan *hinterland* masih sangat rendah yang ditandai dengan besarnya persentase masyarakat yang tidak tamat SD atau hanya menamatkan SD, maka kebutuhan akan adanya sekolah lanjutan menjadi sangat urgen. Dari data yang ada, hingga saat ini di dua Kecamatan kawasan *hinterland* tersebut baru ada tiga SLTP dan 1 SLTA Negeri.

Dengan mengingat kondisi alam kawasan *hinterland* yang berpulau-pulau maka keberadaan SLTP di masing masing desa akan memberikan manfaat yang cukup tinggi. Karena masyarakat tidak lagi dipusingkan dengan biaya yang cukup tinggi apabila ingin menyekolahkan anaknya hingga sekolah lanjutan.

Sekadar sebagai contoh apabila salah seorang orang tua di Desa Bulang Lintang Kecamatan Bulang ingin menyekolahkan anaknya ke SLTP. Ia harus membiayai

transportasi laut tiap harinya pulang pergi ke Pulau Buluh di mana SMP berada sebesar Rp 18.000,- .

Dengan biaya yang cukup besar maka hal itu akan sangat memberatkan orang tua. Tidak heran apabila setelah tamat SD banyak anak usia sekolah lanjutan tidak melanjutkan sekolah ke tingkat yang lebih tinggi.

Untuk lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kawasan *hinterland*, masyarakat di kawasan ini berharap agar pemerintah bersedia mengembangkan agribisnis di pulau-pulau yang memungkinkan untuk dikembangkan seperti di Pulau Kepala Jeri. Sebanyak 165 responden mengemukakan harapannya agar sektor agribisnis dapat dikembangkan di kawasan pulau-pulau ini.

Dengan mengambil contoh pengembangan agribisnis buah mangga di Pulau Kasu dan sayuran di Kepala Jeri masyarakat memerlukan dikembangkan teknik-teknik budidaya pertanian ke arah agribisnis.

*Persetujuan responden atas kebijakan yang perlu dilakukan
Pemko Batam dengan mengembangkan Agrobisnis*

1. Setuju	165	82.5%
2. Tidak setuju	2	1.0%
3. Tidak menjawab	33	16.5%
Jumlah	200	100.0%

Sumber : Data survei

Sektor ekonomi lain yang perlu dikembangkan di kawasan ini menurut perspektif masyarakat adalah industri rumah tangga; pariwisata laut; teknologi budi daya ikan dan mengembangkan pusat perdagangan di kawasan *hinterland*.

*Persetujuan responden atas kebijakan yang perlu dilakukan
Pemko Batam dengan mengembangkan industri rumah
tangga*

1. Setuju	180	90.0%
2. Tidak setuju	0	0.0%
3. Tidak menjawab	20	10.0%
Jumlah	200	100.0%

Sumber : Data survei

Sedangkan kebijakan pengerukan pasir untuk meningkatkan PAD banyak ditolak oleh masyarakat karena dianggap mematikan lahan tangkapan ikan sehingga

profesi sebagian besar masyarakat sebagai nelayan akan sangat terancam (lihat tabel).

Persetujuan responden atas kebijakan yang perlu dilakukan Pemko Batam dengan mengembangkan teknologi budaya ikan

1. Setuju	174	87.0%
2. Tidak setuju	0	0.0%
3. Tidak menjawab	26	13.0%
Jumlah	200	100.0%

Persetujuan responden atas kebijakan yang perlu dilakukan Pemko Batam dengan mengembangkan trade centre

1. Setuju	188	94.0%
2. Tidak setuju	0	0.0%
3. Tidak menjawab	12	6.0%
Jumlah	200	100.0%

Sumber : Data survei
Persetujuan responden atas kebijakan yang perlu dilakukan Pemko Batam dengan mengembangkan pariwisata.

1. Setuju	192	96.0%
2. Tidak setuju	0	0.0%
3. Tidak menjawab	8	4.0%
Jumlah	200	100.0%

Sumber : Data survei
Persetujuan responden atas kebijakan yang perlu dilakukan Pemko Batam dengan pengerukan pasir untuk PAD

1. Setuju	15	7.5%
2. Tidak setuju	170	85.0%
3. Tidak menjawab	15	7.5%
Jumlah	200	100.0%

Sumber : Data survei

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN

Hasil temuan dalam penelitian ini memberikan konfigurasi dan pemetaan karakter sosiologis, sosial, Ekonomi dan budaya yang ada dan berkembang di kawasan *hinterland* Batam.

Baik dengan pendekatan observasi yang disertai dengan wawancara mendalam dengan para elit masyarakat lokal maupun pendekatan survei dengan menanyakan langsung kepada masyarakat melalui kuesioner, diperoleh beberapa temuan yang dapat diacu sebagai kesimpulan.

Pertama, ketertinggalan dan keterbelakangan masyarakat di kawasan *hinterland* sudah begitu kompleks yang secara empiris merupakan fungsi dari persoalan persoalan individual, kultural dan struktural.

Secara individual, masyarakat *hinterland* Batam banyak dijangkiti oleh rasa cepat puas; sikap pasrah fatalistik; sulit diatur; sikap individualisme yang tinggi; sifat boros; dan rendahnya kualitas sumber daya manusia yang

salah satunya ditunjukkan dengan indikator rendahnya pendidikan.

Kedua, masyarakat di kawasan *hinterland* secara kolektif terjepit oleh berlakunya tradisi, adat istiadat dan budaya yang tidak kondusif bagi upaya pemberdayaan dan penguatan diri dan masyarakat.

Tradisi dan budaya yang kemudian menjadi *way of life* masyarakat di kawasan *hinterland* Batam ini pada akhirnya bersifat eksploitatif dan menghisap sumber sumber ekonomi rumah tangga sehingga sirkulasi sumber ekonomi desa lebih banyak keluar yang pada giliran berikutnya sulit untuk dijadikan instrumen mobilisasi bagi peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.

Ketiga, masyarakat di kawasan *hinterland* Batam selain tak mampu mengikuti ritme dan derap laju industrialisasi juga tak berdaya menghadapi sistem politik, ekonomi dan sosial yang tercipta dan diciptakan di kawasan Batam secara keseluruhan.

Sistem perekonomian liberal yang lebih banyak mengacu pada ekonomisme internasional telah menjerat masyarakat *hinterland* ke dalam pusaran kapitalisme yang sangat eksploitatif. Demikian pula sistem politik yang

memberlakukan secara diskriminatif antara masyarakat di kawasan *hinterland* dan kawasan *bonded* yang pada akhirnya memberikan implikasi ekonomi yang sangat tidak menguntungkan bagi masyarakat di kawasan *hinterland*.

Demikian pula sistem sosial yang tercipta telah mengakibatkan masyarakat di kawasan *hinterland* menjadi masyarakat “kelas dua”. Sehingga sistem sosial yang ada tidak cukup efektif untuk mendorong masyarakat lebih progresif, lebih-lebih ditambah dengan munculnya stereotipe yang secara kultural menyudutkan masyarakat ke arah ketidakberdayaan.

Keempat, kelembagaan tradisional yang ada dalam kaitannya dengan penguatan ekonomi masyarakat, peningkatan sanksi-sanksi hukum dan sosial untuk kepentingan rekayasa sosial ke arah yang lebih maju, serta penguatan fungsi-fungsinya sebagai wadah dinamika masyarakat dan dinamika kelompok tidak dapat berlaku efektif. Di sisi lain masyarakat di kawasan *hinterland* sangat terbatas untuk dapat mengakses keberadaan lembaga lembaga modern seperti koperasi dan perbankan yang dapat dijadikan sebagai instrumen bagi upaya penguatan kelompok dan masyarakatnya.

Dihadapkan dengan berbagai problema yang sifatnya multifaset tersebut, masyarakat di kawasan *hinterland* tidak saja tak berdaya menghadapi berbagai tekanan eksternal, tetapi juga tak berdaya untuk mengangkat kepentingan dirinya sehingga sangat memerlukan bantuan orang lain, termasuk pemerintah untuk mengangkat dari jeram ketertinggalan dan ketidakberdayaannya.

Oleh karena itu beberapa implikasi kebijakan yang perlu dilakukan khususnya pemerintah sebagai suatu solusi sesuai dengan judul buku ini yakni *Potret Kehidupan Masyarakat Hinterland Batam*, ada beberapa usulan dan dorongan moral untuk mendorong masyarakat *hinterland* agar dapat maju antara lain :

1. Pemerintah harus dapat memperluas dan memperbaiki fasilitas pendidikan termasuk penyediaan tenaga guru yang cukup untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
2. Pemerintah harus dapat membuka akses komunikasi dan transportasi di kawasan *hinterland* sehingga tidak terisolasi.

3. Pemerintah harus dapat menegakkan *law enforcement* secara baik agar masalah perjudian yang memboroskan dapat diperkecil.
4. Pemerintah harus mampu mendorong pengalihan investasi ke arah kawasan *hinterland* sehingga dapat membuka peluang kerja bagi masyarakat yang pada akhirnya dapat meningkatkan aktivitas perekonomian kawasan *hinterland*.
5. Pemerintah secara kontinyu dituntut untuk melakukan sosialisasi hidup hemat, sosialisasi “*saving habits*” dan mendirikan berbagai lembaga keuangan mikro di desa-desa kawasan *hinterland*.
6. Pemerintah diharapkan dapat melakukan upaya-upaya pelatihan ketenagakerjaan agar terjadi alih profesi atau transformasi tenaga kerja dari sektor tradisional (perikanan laut) ke arah sektor modern (industri dan jasa).
7. Pemerintah diminta mendorong terbentuknya sentra sentra ekonomi produksi yang dilakukan oleh masyarakat *hinterland* yang hingga saat ini masih tertinggal dan terbelakang.

8. Pemko Batam diharapkan dapat membentuk semacam Badan Otorita Hinterland dan semacamnya yang secara khusus menangani berbagai persoalan yang menyangkut upaya-upaya memajukan kawasan *hinterland*.
9. Pemerintah dituntut untuk dapat melakukan reformasi penguasaan tanah sehingga pulau-pulau yang masih kosong dapat dimanfaatkan penduduk untuk kegiatan ekonomi produktif di bidang agrobisnis atau agroindustri.
10. Pemerintah diminta untuk dapat menjaga ekosistem laut sehingga sumber-sumber produksi ikan dapat tetap terjaga dan dapat dimanfaatkan oleh sebagian masyarakat nelayan.



REFERENSI

- Jhingan, M.L. Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2000
- Todaro, Michael P., Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga, Erlangga, Jakarta, 2000
- Mubyarto, Membangun Sistem Ekonomi, BPFE, Yogyakarta, 2000
- Arief, Sritua, Teori dan Kebijakan Pembangunan, CIDES, Jakarta, 1998
- Soekanto, Soerjono, Beberapa Teori tentang Struktur Masyarakat, Rajawali Press, Jakarta, 1993
- World Bank, The Quality of Growth, PT. Gramedia Utama, Jakarta, 2001
- Soetomo, Strategi-strategi Pembangunan Masyarakat, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006
- Jodjohadikusumo, Sumitro D, Perdagangan dan Industri Dalam Pembangunan, LP3ES, Jakarta, 1985

Djodjohadikusumo, Sumitro, Kebijakan di Bidang
Ekonomi Perdagangan, Jajasan Penjuluh, Jakarta, 1972

Wie Thee Kian, Industrialisasi di Indonesia, LP3ES,
Jakarta, 1996

Nasution, Ade P. Membaca Indonesia dari Kaca Mata
Batam, Unrikapress, Batam, 2016

Todaro, Michael P, Pembangunan Ekonomi di Dunia
Ketiga, Jilid 1, Edisi Ketujuh, Jakarta, Penerbit Erlangga
Jhingan,. Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan,
Jakarta : Rajawali Press. 2000